



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021 - 2026

DINAS KESEHATAN

Jalan Perintis KM. 1 Tideng Pale



Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Kuasa atas perkenan dan hidayah-Nya maka dokumen **“Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026”** ini dapat disusun sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan program dan kegiatannya dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dokumen ini merupakan hasil diskusi, ide-ide, masukan dan analisa yang telah disepakati oleh berbagai pihak yang konsen dengan arah dan tujuan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan prioritas program dan kegiatannya sebagai salah satu instansi pelayanan masyarakat di bidang kesehatan. Harapan kami, dokumen ini juga dapat menjadi salah satu sumber acuan dan pedoman, serta pertimbangan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi untuk melaksanakan upaya-upaya pengelolaan pelayanan kesehatan bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung secara terpadu dan berkelanjutan, baik antar wilayah maupun antar sektor.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, sehingga dengan segala kerendahan hati, kami mohon masukan dan saran untuk terus dapat meningkatkan kualitas dan arah serta tujuan pengelolaan bidang Kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Tana Tidung. Kami mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya anggota Tim RENSTRA Dinas Kesehatan, atas segala dukungan dan partisipasinya dalam menyusun dan menyempurnakan dokumen ini.

Akhir kata semoga RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya dan untuk lebih meningkatkan kualitas serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung pada khususnya, sehingga pembangunan kesehatan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilaksanakan secara optimal dan terpadu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, September 2021
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung



H. Syachril, SE., M.Ap
NIP. 19711129 199803 1 004

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	li
DAFTAR ISI	lii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN	 7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	7
2.2. Sumber Daya Dinas Kesehatan	13
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	44
 BAB III ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG	 46
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	46
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	48
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan	50
3.4. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara	51
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	52
3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	52
3.7. Penentuan Isu - Isu Strategis Dinas Kesehatan	54
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 56
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	56
 BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	 59
5.1. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung	59

BAB VI.	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
	6.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII	PENUTUP	88

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 diawali dengan persiapan penyusunan antara lain pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi Renstra, penyusunan agenda kerja tim Renstra, dan pengumpulan data dan informasi. Berdasarkan data dan informasi yang berhasil dikumpulkan tersebut, disusun Rancangan awal Renstra Dinas Kesehatan dengan kegiatan analisis permasalahan, analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan, dan penelaahan dokumen perencanaan yang terkait, misalnya Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Selanjutnya dari hasil analisis dan telaah tersebut, dirumuskan sekaligus dianalisis isu-isu strategis yang hasilnya akan

dijadikan dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berdasarkan arah kebijakan maka ditetapkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung maka Dinas Kesehatan wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang kesehatan, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1422);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2021).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai dasar bagi seluruh *stakeholder* Bidang Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung khususnya bidang kesehatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kesehatan

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan.

BAB III Isu Strategis

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021-2026.

BAB VI Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi mengenai indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

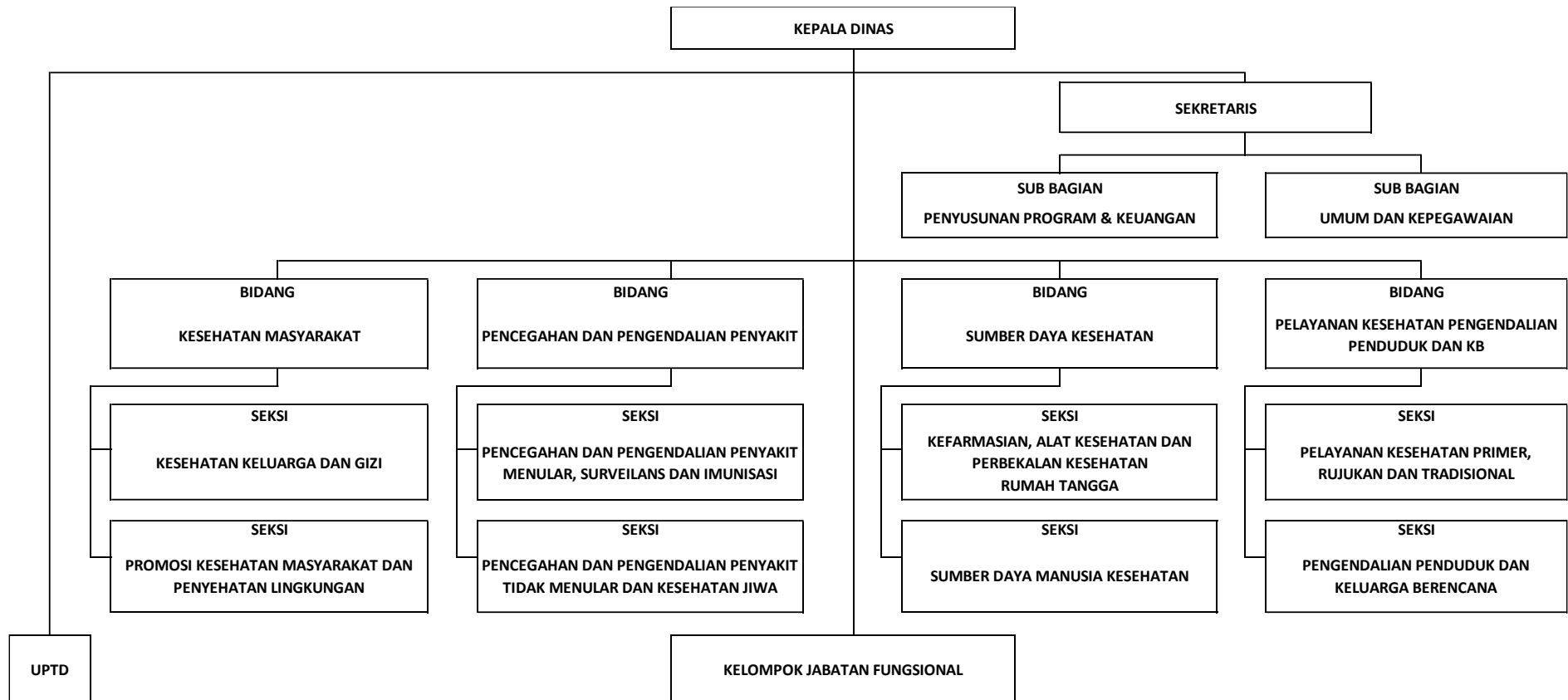
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, tugas pokok dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung yang dalam melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, uraian tugas jabatan struktural Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah kabupaten. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), sumber daya kesehatan serta pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang kesehatan.

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas kesehatan;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas kesehatan;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan Dinas Kesehatan serta penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Kesehatan;
- e. Penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- f. Pelaksanaan urusan keuangan;
- g. Pelaksanaan urusan umum;

- h. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- i. Pelaksanaan urusan aset;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- l. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- m. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- n. Pelaksanaan pelayanan administratif kepada Kepala Dinas dan bidang-bidang di lingkungan Dinas Kesehatan;
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, surveilans dan imunisasi, dan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;

- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sumber daya manusia kesehatan;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional serta Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran kegiatan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Dinas Kesehatan

Sumberdaya merupakan potensi yang dimiliki oleh organisasi atau instansi yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kesehatan diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan dan berdasarkan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021

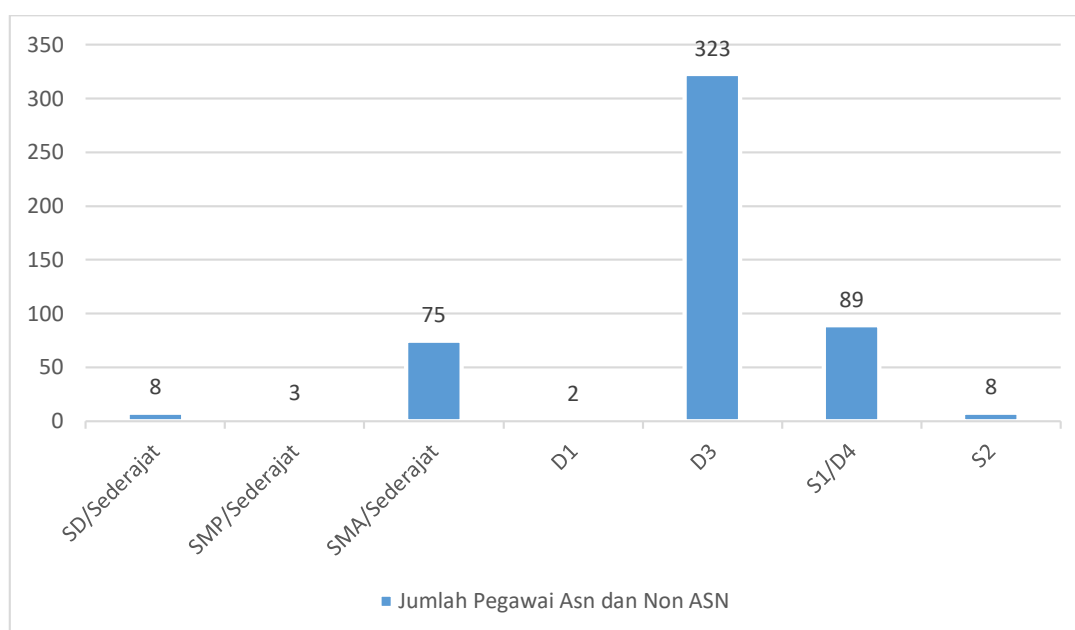
No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	0	0	2	6	8
2	SMP Sederajat	0	0	2	1	3
3	SMA Sederajat	10	2	41	22	75
4	D1	0	2	0	0	2
5	D3	70	197	12	44	323
6	S1/D4	26	44	6	13	89
7	S2	2	4	1	1	8
8	S3	0	0	0	0	0
Total		108	249	64	87	508

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.1. diketahui bahwa jumlah pegawai di Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) di bawahnya yang meliputi Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas dan Instalasi Farmasi Kabupaten pada tahun 2021 adalah sebanyak 508 orang (data per September 2021). Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 357 orang ASN/PNS dan 151 orang Non ASN/PNS. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan paling banyak memiliki tingkat pendidikan D3 yakni sebanyak 323 orang. Rasio jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin, diketahui lebih banyak pegawai berjenis kelamin perempuan dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin laki-laki baik pada ASN maupun non ASN. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Dari 357 orang ASN ini kemudian di tentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021

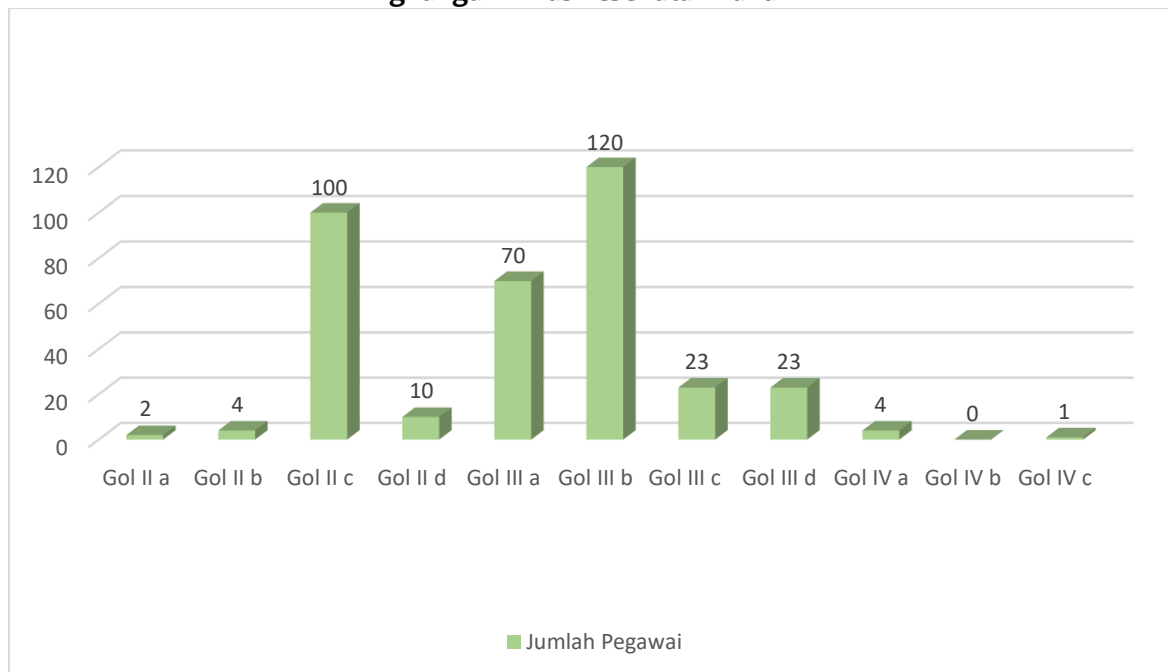
No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan IIa	0	2	2
2	Golongan IIb	4	0	4
3	Golongan IIc	28	72	100
4	Golongan IId	3	7	10
5	Golongan IIIa	17	53	70
6	Golongan IIIb	37	83	120
7	Golongan IIIc	6	17	23
8	Golongan IIId	11	12	23
9	Golongan IVa	1	3	4
10	Golongan IVb	0	0	0
11	Golongan IVc	1	0	1
Total		108	249	357

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.2. dapat dilihat bahwa jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan berdasarkan golongan paling banyak adalah pegawai dengan Golongan IIIb

yakni sebanyak 120 orang, sedangkan paling sedikit adalah pegawai dengan Golongan IVc yakni 1 orang. Komposisi pegawai berdasarkan golongan juga dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di Lingkungan Dinas kesehatan Tahun 2021



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

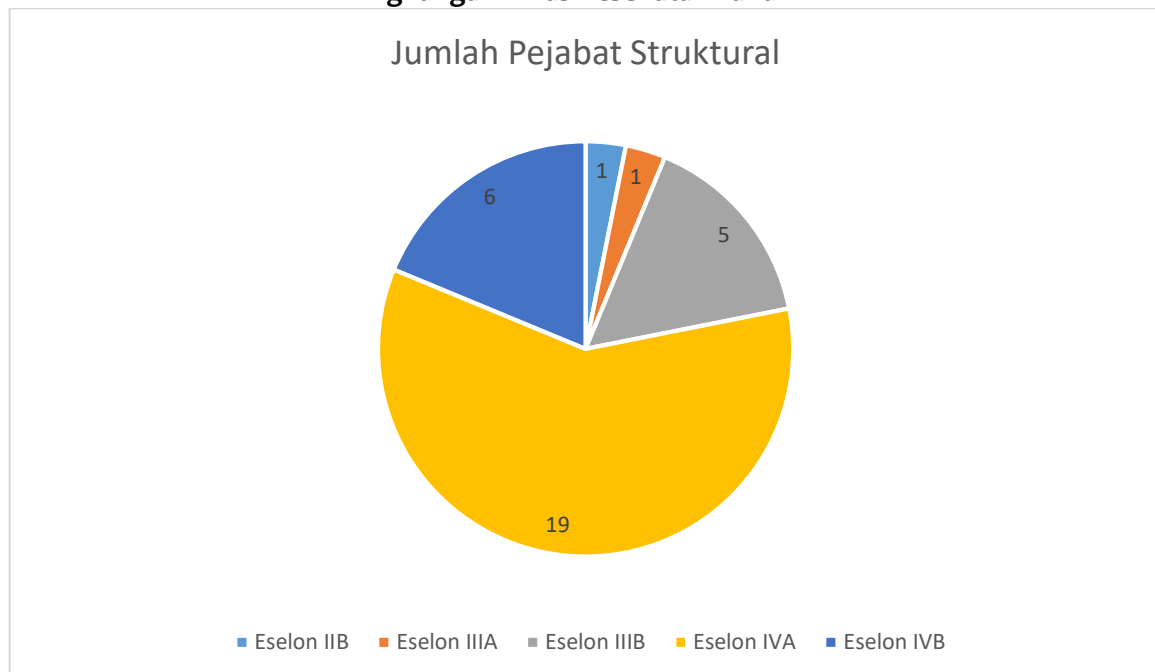
Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Struktural & Fungsional	L	P	Jumlah
1	Eselon IIB	1	0	1
2	Eselon IIIA	1	0	1
3	Eselon IIIB	1	4	5
4	Eselon IVA	11	8	19
5	Eselon IVB	2	4	6
TOTAL		16	16	32

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.3. dapat dilihat bahwa jumlah pejabat eselon di lingkungan Dinas Kesehatan adalah sebanyak 32 orang, dengan komposisi paling banyak pejabat eselon IVA yakni sebanyak 19 orang. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural juga dalam dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.4.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Tahun 2021



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kesehatan berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Jumlah Kendaraan Bermotor
Dinas Kesehatan Tahun 2021

No	Jenis Kendaraan	Tahun	Tipe/Merk Kendaraan	Jumlah		
				B	RR	RB
I	Kendaraan Roda Empat			B	RR	RB
1.	Kendaraan dinas Bermotor lain	2012	Toyota Avanza Veloz	1		
2.	Kendaraan dinas Bermotor lain	2012	TOYOTA HILUX PICK UP 2.5L DSL MT	1		
3.	Mobil Ambulance	2013	FORD EVEREST 2.5L 10-S M/T	1	1	
4.	Kendaraan dinas Bermotor lain	2014	Toyota Avanza Veloz M/T	4	1	
5.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	2014	Toyota Hilux Double Cabin	1		
6.	Mobil Ambulance	2014	FORD RANGER 2,2		1	

No	Jenis Kendaraan	Tahun	Tipe/Merk Kendaraan	Jumlah		
7.	Mobil Ambulance	2015	GC415V APV DL X MT/Suzuki AVP	1		
8.	Mobil Ambulance	2015	GC415V APV SD X MT/Suzuki AVP	1		
9.	Mobil Ambulance	2016	Inova	3		
10.	Mobil Ambulance Jenazah	2016	Suzuki	1		
11.	Kendaraan dinas Bermotor lain	2017	TOYOTA HILUX PICK UP 2.5L DSL MT	1		
12.	Mobil Ambulance Jenazah	2017	DAIHATSU (MBL JENAZAH)	1		
13.	Mobil Ambulance Pusling	2017	Toyota Hilux Double Cabin	2		
Total				18	3	
II	Kendaraan Roda Dua			B	RR	RB
1	Sepeda Motor	2006	HONDA/SUPRA 125		1	1
2	Sepeda Motor	2005	YAMAHA/FIZ-R 110			1
3	Sepeda Motor	2006	HONDA/GLP III 145		1	1
4	Sepeda Motor	2009	SUZUKI FL 125 RCD		1	
5	Sepeda Motor	2010	SUZUKI FL 125 RCD		5	
6	Sepeda Motor	2010	YAMAHA 3C1 (V-IXION/FZ150)	1		2
7	Sepeda Motor	2011	YAMAHA 55S (T135SEC)	2	2	1
8	Sepeda Motor	2013	HONDA NC12AF2CBi A/T	3	2	
9	Sepeda Motor	2014	AFX12U21Co8 M/T GFO/ Honda	30		
10	Sepeda Motor	2016	Honda Beat	3		
11	Sepeda Motor	2016	Yamaha/ Jupiter	3		
12	Sepeda Motor	2019	Viar/ Trail	8		
13	Sepeda Motor	2019	Yamaha/Jupiter z cw biru	7		
14	Sepeda Motor	2019	Yamaha Sporty	1		
Total				58	12	6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Keterangan:

B = Baik

RR = Rusak Ringan

RB = Rusak Berat

Tabel 2.5.
Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap
di RSUD AKHMAD BERAHIM Tahun 2021

No	Ruang	Kelas							Total
		VIP	I	II	III	Non Kelas	Isolasi	Intensif	
1	Rawat Inap	0	0	0	0	34	2	0	36
2	Icu	0	0	0	0	0	0	4	4
3	Isolasi Covid-19	0	0	0	0	28	0	0	28
Total		0	0	0	0	62	2	4	68

Sumber : RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.5. dapat dilihat bahwa jumlah tempat tidur ruang perawatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung sebanyak 68 unit tempat tidur, yakni 34 unit di Ruang Rawat Inap Non Kelas, 2 unit di Ruang Rawat Inap Isolasi, 4 unit berada di Ruang ICU, dan 28 unit di Ruang Isolasi Covid-19. RSUD Akhmad Berahim saat ini masih memiliki keterbatasan terkait ketersediaan sarana dan prasarana termasuk jumlah tempat tidur di Ruang Rawat Inap khususnya untuk Ruang Rawat Inap Kelas VIP dan lainnya.

Tabel 2.6.
Jumlah Alat Kesehatan
di RSUD Akhmad Berahim Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan				Total	Ket
		2014	2016	2019	2020		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Meja Ginekologi Elektrik			1		1	baik
2	Gynecology Bed	4				4	1 Rusak
3	Currette set	2	2		2	6	2 rusak
4	Baby suction pump	2				2	baik
5	Hematology analizer	1			1	2	baik
6	Mesin anastesi	1				1	rusak ringan
7	Electrocauter (ESU)	1				1	rusak ringan
8	Suction pump untuk bedah	1				1	rusak ringan
9	Section set	1				1	baik
10	Defibrillator + trolley	1				1	baik
11	USG color doppler system	1				1	baik
12	Meja operasi manual	1				1	baik
13	Vacum set (untuk obstetry gynecology)+ trolley	2				2	baik
14	Phototherapy lamp	1				1	baik
15	Infant warmer	1				1	baik
16	Bubble baby CPAP	1				1	rusak

17	Infant Incubator	1				1	rusak ringan
18	Patient monitor	1			2	3	baik
19	Dental unit	1				1	rusak ringan
20	Sterilisor	1				1	baik
21	Cold chain	1				1	baik
22	Pharmacy refrigerator	1				1	rusak ringan
23	Circumcision surgery set	2				2	rusak
24	Hecting instrument set	2			4	6	2 rusak
25	Partus instrument set	2			1	3	1 rusak
26	Film viewer double 800 x 450 x 80 mm	5			2	7	baik
27	Lampu operasi mobile	1	1			2	1 rusak
28	Ultrasonic pocket doppler		3		2	5	3 rusak
29	Fetal doppler		1			1	rusak
30	Water Bath		1			1	baik
31	Microscope		1			1	baik
32	Timbangan bayi digital			2		2	baik
33	Nebulizer			3	1	4	baik
34	Wheel Chair Alumunium		4	2		6	baik
35	Head Lamp with Adaptor			2		2	baik
36	Tensimeter Digital / HBP-9020			6		6	baik
37	Ranjang perawatan elektrik			4		4	baik
38	Ranjang perawatan Manual (1 crank)			5		5	baik
39	Ranjang perawatan Manual (2 crank)	23				23	baik
40	Ranjang perawatan Manual (3 crank)	6			32	38	baik
41	Ranjang perawatan anak				8	8	baik
42	Oxygen Concentrator		1	1	1	3	baik
43	Examination Lamp			2	2	4	baik
44	Infusion pump			1	2	3	baik
45	Pulse Oxymetry			2	1	3	2 rusak ringan
46	Portable Suction Pump			3		3	baik
47	Syringe Pump		1	2	2	5	1 rusak berat
48	Utility Trolley			1		1	baik
49	Suction Pump			2		2	baik
50	Stethoscope Erkaphone adult	5	6	12	3	26	11 rusak
51	Resuscitators Infant			4		4	baik
52	Electrocardiograph	1		1	1	3	1 rusak ringan
53	Tensimeter Aneroid Mobile			5	2	7	baik

54	Thermometer Digital			4	25	29	baik
55	Minor Surgery Instrument Set		2	4		6	2 rusak
56	Tiang Infus		20	3	15	38	20 rusak
57	Mobile Stretcher		3	2	2	7	2 rusak
58	Centrifuge			1	1	2	rusak
59	Digital Personal Scale			4	5	9	rusak
60	Tempat tidur periksa	5				5	rusak
61	MPM ERKA Aneroid tensimeter perfect		3			3	3 rusak
62	MPM ERKA tensimeter air raksa erkameter 300 eco		5			5	5 rusak
63	MPM ERKA tensimeter air raksa stand klinik		4			4	4 rusak
64	MPM ERKA Stethoscope Finesse dua child & infant		5			5	5 rusak
65	Agfa Healthcare hardcopy imager system		1			1	1 rusak
66	MAK wheel chair 31303		4			4	4 rusak
67	MAK foot step (341520)		5			5	5 rusak
68	MAK Mayo stand 35103		4			4	4 rusak
69	MAK Medicine trolley 25 drawers 36601		2			2	2 rusak
70	BBRAUN Aesculap Vaginal speculum set		1			1	1 rusak
71	OTTO - LIEBINGER other Instrument - pinset chirurgis		10			10	10 rusak
72	OTTO - LIEBINGER other Instrument - pinset Anatomis		10			10	10 rusak
73	OTTO - LIEBINGER other Instrument - Korentang /sponge & Dressing Forcep		5			5	5 rusak
74	OTTO - LIEBINGER Conservation set - plastik filling		2			2	2 rusak
75	OTTO LIEBINGER Conservation set -Instrument filling		2			2	2 rusak
76	OTTO LIEBINGER Conservation set - Matrix holder / Matrix retainer		2			2	2 rusak
77	OTTO LIEBINGER Impression tray Upper no. 0		2			2	2 rusak
78	OTTO LIEBINGER Impression tray Upper no. 1		2			2	2 rusak
79	OTTO LIEBINGER Impression tray Upper no. 2		2			2	2 rusak
80	OTTO LIEBINGER Impression tray Upper no. 3		2			2	2 rusak
81	OTTO LIEBINGER Impression tray Upper no. 4		2			2	2 rusak
82	OTTO LIEBINGER other instrument - Artei klem bengkok		2			2	2 rusak
83	OTTO LIEBINGER other instrument - Tongue spatula		2			2	2 rusak
84	OTTO LIEBINGER Extraction Tongs for adult - Lower		2		2	4	2 rusak
85	OTTO LIEBINGER Extraction Tongs for adult - Upper root		2			2	2 rusak
86	OTTO LIEBINGER Extraction Tongs for children - Upper		2			2	2 rusak
87	OTTO LIEBINGER Extraction supporting - Mayo Hengar needle holder		2			2	2 rusak
88	OTTO LIEBINGER Diagnostic set- Mounth mirror plane (12pcs/box)		2			2	2 rusak

89	OTTO LIEBINGER Diagnostic set- Mounth mirror handle		3		3	6	3 rusak
90	OTTO LIEBINGER conservation set - semen stoper besar		2			2	2 rusak
91	OTTO LIEBINGER conservation set - semen stoper kecil		2			2	2 rusak
92	OTTO LIEBINGER conservation set - semen spatula		2			2	2 rusak
93	OTTO LIEBINGER Impression tray lower no.0		1			1	1 rusak
94	OTTO LIEBINGER Impression tray lower no.1		2			2	2 rusak
95	OTTO LIEBINGER Impression tray lower no.2		2			2	2 rusak
96	OTTO LIEBINGER Impression tray lower no.3		2			2	2 rusak
97	OTTO LIEBINGER Impression tray lower no.4		2			2	2 rusak
98	DRAGONMED MICROPIPET FIX VOL 500 UL		5			5	5 rusak
99	DRAGONMED MICROPIPET FIX VOL 100 UL		5			5	5 rusak
100	DRAGONMED MICROPIPET FIX VOL 50 UL		5			5	5 rusak
101	DRAGONMED MICROPIPET FIX VOL 20 UL		5			5	5 rusak
102	DRAGONMED MICROPIPET FIX VOL 10 UL		5			5	5 rusak
103	DRAGONMED MICROPIPET FIX VOL 5 UL		5			5	5 rusak
104	Electrolyte Analyzer and Accessories				1	1	baik
105	ROCHE Urisys 1100 Urine Analyzer and accessories				1	1	baik
106	Inverter Type Mobile X-Ray Equipment IME-100L				1	1	baik
107	Computed Radiography (CR) System				1	1	baik
108	PRORAY Thyroid Protection Apron / 515				3	3	baik
109	PRORAY Double Protective Apron / 63				3	3	baik
110	Baby Basket Acrylic / Infant Bed Stainless Steel HBI-01				5	5	baik
111	Verlos / Delivery Table S/S Plus Foot Step S/S				2	2	baik
112	Drum Sterilisasi / Verban Tromol Stainless Steel Dia. 15 cm				5	5	baik
113	Drum Sterilisasi / Verban Tromol Stainless Steel Dia. 27 cm				2	2	baik
114	Gynecology Examination Instrument Set				2	2	baik
115	IUD Kit				1	1	baik
116	Fetal Monitor (CTG)				1	1	baik
117	Bur Carbide Highspeed				1	1	baik
118	Ultrasonic Piezo scaler UDS L - LED				1	1	baik
119	PROJECTION VEIN FINDER				1	1	baik
120	Pulse Oxymeter babby				1	1	baik
121	Alat exo / bedah mulut	1				1	baik
122	Human humasens plus		2			2	1 rusak
123	Alat tambal gigi	1				1	baik
124	Hand / diagnostic instrument	1				1	baik

125	Tensimeter + manset anak	5				5	rusak
127	Poly medical oxygen therapy complete set (6 m ³)		20			20	baik
128	Poly meja resusitasi		2			2	baik
129	Poly bed screen double s/s		10			10	7 rusak
130	Poly stand waskom s/s double K.5 + waskom		10			10	4 rusak
131	Fyrom international Urinal Adult		5			5	baik
132	Speculum Hidung Lempert SML SS				3	3	baik
133	Large Hospital Autoclave (5596) dua Pintu				1	1	baik
134	SECA Flat scale mechanic - seca 762				5	5	rusak
135	BABY scale mechanic - seca 725				3	3	rusak
136	Ophthalmoscope with Lithium Handle				4	4	baik
137	UV Room Steriizer MUV-01	1			1	2	baik
Total		88	232	79	171	570	

Sumber : RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.6. dapat disimpulkan bahwa RSUD Akhmad Berahim memiliki alat-alat kesehatan yang sebagian besar dalam kondisi baik. Usia pakai alat-alat kesehatan tersebut juga terbilang masih baru, mengingat tahun pengadaan paling lama adalah tahun 2014 serta sebagian besar alat-alat kesehatannya diadakan pada tahun 2020. Namun demikian, RSUD Akhmad Berahim masih memerlukan banyak alat-alat kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan dalam upaya pemenuhan Akreditasi Rumah Sakit serta menaikkan kelas atau tipe Rumah Sakit dari D Pratama menjadi tipe C.

Tabel 2.7.
Data Ketersediaan Gedung/Ruangan
di RSUD Akhmad Berahim Tahun 2021

No	Nama Gedung/Ruangan	Ketersediaan	
		Ada	Tidak Ada
1	Instalasi Gawat Darurat (IGD)	√	
2	Instalasi Rawat Jalan	√	
3	Gudang Farmasi	√	
4	Kebidanan (VK)	√	
5	Instalasi Rehabilitasi Medik	√	
6	Instalasi Hemodialisa	√	
7	Instalasi Bedah Sentral (OK)	√	
8	Instalasi CSSD	√	
9	Ruang ICU	√	
10	Instalasi Radiologi	√	
11	Instalasi Laboratorium	√	
12	Instalasi Rawat Inap	√	

13	Instalasi Gizi	√	
14	Instalasi Laundry	√	
15	Instalasi Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSRS)		√
16	Instalasi Kesling dan K3		√
17	Instalasi Pemulasaran Jenazah	√	
18	Instalasi Gas Medik	Proses	
19	Ruang Genset		√
20	TPS Limbah B3	√	
21	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	√	

Sumber : RSUD Akhmad Berahim Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2.7. dapat dilihat bahwa ketersediaan gedung atau ruangan di RSUD Akhmad Berahim masih terbatas dan kurang. Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim masih sangat perlu dilakukan pengembangan, khususnya terkait ketersediaan gedung atau ruangan.

Tabel 2.8.
Aset Tanah Dinas Kesehatan

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Luas (MP²)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal Usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	800	1992	Jl. Tana abang/S.Riyadi (Tideng Pale)	Hak Pengelolaan	6/29/1992	AB 266427	Bangunan rumah staf medis	Hibah	240.000	eks Bulungan hasil inventarisasi/penilaian yang sesuai dengan BAST (Tideng Pale)
2.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	775	1992	Jl.tana abang (samping acacia) Tideng Pale	Hak Pengelolaan	6/29/1992	AB 266428		Hibah	232.500	eks bulungan hasil penilaian/inventarisasi sesuai BAST
3.	Tanah Bangunan Puskesmas / Posyandu	1.430	1992	Jl.Tana abang/S.Riyadi	Hak Pengelolaan	6/29/1992	AB 266426	Bangunan eks PKM Lama	Hibah	429.000	eks bulungan hasil penilaian/inventarisasi yang sesuai BAST
4.5.	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	360	1993	Desa Bebatu Supa	Hak Pengelolaan			Bangunan Pustu Bebatu Supa	Hibah	1.800	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir)
6.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	600	1993	Desa Buong Baru	Hak Pengelolaan			Bangunan Pustu Buong Baru	Hibah	1.470	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir)
7.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400	1993	Desa Tengku Dacing	Hak Pengelolaan			Bangunan Pustu Tengku Dacing	Hibah	364	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Tana Lia)
8.	Tanah Kaveling (dst)	375	2001	Sesayap Hilir	Hak Pengelolaan			Bangunan Staf medis	Hibah	32.812,50	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir) - Tanah Bangunan staf medis puskesmas (eks. pustu)
9.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	7.000	2002	Sesayap Hilir	Hak Pengelolaan			Bangunan Komplek PKM Sesayap Hilir	Hibah	612.500	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Sesayap Hilir)
10.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	7.000	2007	Tana Lia	Hak Pengelolaan			Bangunan Komplek Puskesmas	Hibah	35.000	Eks bulungan penilaian/inventarisasi sesuai BAST (PKM. Tana Lia)
11.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.250	2007	Sesayap sp3	Hak Pengelolaan			Pustu	Hibah	12.500	Tanah Bangunan Pustu UPT SP3 Sesayap

12.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.250	2007	Desa Tana Merah	Hak Pengelolaan			Pustu	Hibah	6.250	Tanah Bangunan Puskesmas pembantu UPT SP1 Tanah Merah
13.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	5.000	2010	Jl. Desa Kujau Rt.02 Kec.Sesayap	Hak Pengelolaan		12/2007/SKPT /KDK/VI/2010	Pustu Kujau	Hibah	50.000	NO HIBAH 02/2007/SH/KDK/VI/2010 P = 100 L = 50
14.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	400	2010	Jl. Desa Bebatu Supa Rt.04 Kec.Sesayap Hilir	Hak Pengelolaan		01/RT/IV/BB/V III/2010	Pustu Bebatu Supa	Hibah	2.000	P =20 L = 20
15.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	600	2010	JL. JEJABUL RT.02 DESA MANJELUTUNG KEC. SESAYAP	Hak Pengelolaan		138.593.2/36/ KEC- SH/PEMB/VII/ 2010	Pustu Manjelutung	Hibah	210	P = 30 L = 20
16.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.400	2010	JL. UJANG MALA RT.01 DESA TENGKU DACING KEV. TANA LIA	Hak Pengelolaan			Pustu Tengku Dacing	Hibah	2.184	P = 40 L =60
17.	Tanah Bangunan Puskesmas /Posyandu	1.500	2011	Jl. Tideng Pale Kec. Sesayap	Hak Pengelolaan		19/SPP/KD- SBW/III/2011	Pustu Sebawang		990	P = 50 L = 30, Pemilik Lahan Jamhari.i
18.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.500	2011	Jl. Linsayung Rt.02 Desa Seputuk Kec. Sesayap	Hak Pengelolaan		34/SKPHT/KD SP/IV/2011	Pustu Seputuk		15.000	legalisasi camat 593/017/SH/CMT- SSYP/IV/2011 p = 50 l = 30
19.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.000	2011	Jl. Selamat Riadi Rt.01 Kec. Sesayap	Hak Pengelolaan		21-2011/KDS- G/III/2011	Pustu Gunawan		10.000	Legalisasi camat 593/022/sh/cmt-ssyp/v/2011 p = 50 l = 40
20.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	5.000	2011	Jl. Poros Trans Kaltim Desa Kujau	Hak Pengelolaan		593/SKPT/03 6/CMT- SSYP/2010	Puskesmas Kujau		326.471	Tanah Bangunan Lama Rp. 50.000.000 + Tanah bangunan Baru Rp. 50.000.000 + Perencanaan Tanah Urukan Rp. 14.850.000 + Pengawasan Tanah Urukan Rp. 11.841.00 + Fisik Urukan Rp. 199.780.000
21.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.000	2011	Jl. Borneo Rt.01 Desa Buong 22.Baru Kec. Sesayap Hilir	Hak Pengelolaan		021/SPPT/KD S-BB/III/2010	Pustu Buong Baru		3.400	NO HIBAH 022/SH/IV/2011, LEGALISASI CAMAT 138.593.2/13/KEC- SH/PEMB/III/2011
22.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	3.000	2011	Jl. Pemakaman Muslim Rt. 01	Hak Pengelolaan	12/23/2011	94/KDTP/VIII/ 2984	Puskesmas Tideng Pale Timur		30.000	Legalisasi Camat/Rt : 87/A- 14/VIII/1984. P = 100 L = 30 Pemilik lahan Rumsiah

				Tideng Pale Timur							
23.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	60.000	2012	Desa Sebwang	Hak Pengelolaan	3/1/2012	02.PDT.G/2011/PN.TG.SLR	Rumah Sakit	Pembelian	1.148.519,02	Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
24.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	450	2016	Jln. H. Ismail RT. 01 Desa Menjelutung, Kec. Sesayap Hilir. Kabupaten Tana Tidung	Hak Pengelolaan			Pembangunan Rumah Dinas Dokter	Hibah	157.50	Surat Hibah Lokasi Pembangunan Rumah Dinas Kesehatan Di Desa Menjelutung Kecamatan Sesayap Hilir. Kabupaten Tana Tidung
25.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	600	2016	Jln. Jumbun RT. 002 Desa Sebwang. Kecamatan Sesayap	Hak Pengelolaan			Pembangunan Balai Penyuluh KB	Hibah	396	Ketersediaan Lokasi Pembangunan Balai Penyuluh KB. Di Desa Sebwang. Kecamatan Sesayap
26.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	930	2016	JL. TEMANGGUNG RT II DESA BEBAKUNG	Hak Pengelolaan			PUSTU BEBAKUNG	Hibah	9.300	P = 31 L = 30
27.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.500	2016	Jln Poros Kaltim Desa Sapari Kec. Muruk Rian, Kabupaten Tana Tidung	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Sapari	Hibah	25.000	Surat Keterangan Hibah Melepaskan Hak atas Tanah Areal Pembangunan Pustu Di Desa Sapari
28.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.200	2016	Jln. Desa Mendupo	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Mendupo	Hibah	12.000	Surat Hibah Pustu Mendupo
29.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.500	2017	JL. GANG SAMIT RT.001	Hak Pengelolaan			PUSTU BELAYAN ARI495	Hibah	25.000	P = 50 L = 50
30.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	750	2017	Jln. Trans Sambungan	Hak Pengelolaan			Bangunan Puskesmas/Pos yandu	Hibah	495	Surat Keterangan Tanah Pembangunan Pustu Sambungan (Pasum) Pasilitas Umum
31.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.500	2018	Jn. Simpang Empat Poros Pemda, RT 02	Hak Pengelolaan			Puskesmas Muruk Rian	Hibah	15.000	Surat Hibah Lokasi Pembangunan Puskesmas di desa rian,Kec Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung
32.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	418	2018	Jln. Pelajar RT. 01 Desa Kapuak. Kec. Muruk Rian	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Kapuak	Hibah	4.180	Surat Hibah Lokasi Pustu Di Desa Kapuak Kecamatan Muruk Rian

33.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	.500	2018	Jln. Trans Sambungan	Hak Pengelolaan			Pembangunan Pustu Sambungan Selatan	Hibah	990	Surat Keterangan Tanah Pembangunan Pustu Sambungan (Pasum) Pasilitas Umum
34.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	1.000	2019	I. Tarakan Jaya Desa Sambungan Kec. Tana Lia	Hak Pakai			bangun Penyuluh KB	Pembelian	600	Tanah Bangunan balai Penyuluh KB di Desa Sambungan Kec. Tana Lia
35.	Tanah Bangunan Rumah Sakit	20.000	2020	Jl. Trans Sambu8ngan Kec. Tana Lia	Hak Pengelolaan			Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tana Lia	Hibah	13.200	Surat Hibah Tanah Untuk Pembangunan Rumah Sakit Pratama Tana Lia di Kec. Tana Lia
36.	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	300	2020	Jl. Aki asar/02. Desa Rian Kecamatan Muruk Rian	Hak Pengelolaan			Pembangunan Balai Penyuluh KB	Hibah	3.000	Surat Hibah Tanah Pembangunan Balai Penyuluh KB Batas , U Tanah Desa, T Rumah Produksi KWT, S Tanah Desa Rian dan B Sekolah PAUD Mulia Desa Rian

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Tabel 2.9.
Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Kurang Baik	135	Desa Bebatu		Tanah Milik Pemda	Hibah	75.060
2.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Baik	128	Desa Sengkong		Tanah Milik Pemda	Hibah	435.450
3.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Kurang Baik	84	Desa Buong Baru		Tanah Milik Pemda	Hibah	45.948
4.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Baik	135	Desa Tengku Dacing		Tanah Milik Pemda	Hibah	81.960
5.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	40.61	Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	20.832,93
6.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	200	Jln. Agis Pulak Kec. Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	4.179.007,50
7.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	90	Jl. Tanah Abang Slamet Riyadi		Tanah Milik Pemda	Hibah	213.508,83
8.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	49.21	Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	191.285,37
9.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Kurang Baik	40.61	Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Hibah	23.310,14
10.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1063,01	Jln. Printis KM 1 Kec. Sesayap (Bangunan Kantor dinas kesehatan)		Tanah Milik Pemda	Hibah	6.213.936,77

11.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	200	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	4.082.177,20
12.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik	72	Desa Tanah Merah		Tanah Milik Pemda	Hibah	121.003
13.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Sesayap SP3		Tanah Milik Pemda	Hibah	150.706
14.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	106.02	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	228.657,05
15.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	64	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	36.212
16.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Baik	77	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	57.951
17.	Bangunan Tempat Tinggal Lainnya	Baik	77	Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Hibah	59.100
18.	Pagar Permanen	Baik		Tideng Pale		Tanah Milik Pemda	Pembelian	289.891,93
19.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Rian Kec. Muruk Rlan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	486.450,583
20.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Desa Kujau RT. 02 Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	385.044,13
21.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Desa badan bikis		Tanah Milik Pemda	Pembelian	374.556,46
22.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Jl. Tana Abang/ S.Riyadi (Tideng Pale) Lokasi PKM Tideng Pale		Tanah Milik Pemda	Pembelian	152.100
23.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		JL. DESA BEBATU SUPA RT.04 KEC.SESAYAP HILIR		Tanah Milik Pemda	Pembelian	581.651,13
24.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		JL. JEJABUL RT.02 DESA MANJELUTUNG KEC. SESAYAP		Tanah Milik Pemda	Pembelian	676.987,46
25.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Linsayung Rt. 02 Desa Seputuk Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	522.755,13
26.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Tideng Pale Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	473.631,13
27.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Selamat Riadi RT. 01 Kec. Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	469.776,13
28.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Poros Trans Kaltim Desa Kujau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.976.982
29.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Ujang Mala Rt. 01 Desa Tengku Dacing Kec. Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	794.503
30.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Borneo Rt. 01 Desa Buong Baru Kec Sesayap hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	490.752,63
31.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Jl. Tarakan Jaya		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.959.493,50
32.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Ds. Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	249.995,50
33.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Ds. Kujau Kec. Betayau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	230.735,50
34.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Jl.tana abang (samping acacia) Tideng Pale Bangunan Rumah Dinas Para medis		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.694.008,25

35.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Jl. Gereja		Tanah Milik Pemda	Pembelian	384.783,50
36.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Baik		Jl. Pemakaman Muslim RT. 01 Tideng Pale Timur		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.009.399,74
37.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Jl. Pemakaman Muslim Rt. 01 Tideng Pale Timu0072		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.328.937,64
38.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik		Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	367.065,50
39.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	Baik		Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	368.505,50
40.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Simpang Empat Poros Pemda KTT		Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.553.516,47
41.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Rumah sakit Ahmad Berahim (Jln. Perintis KM 1 Kec. Sesayap)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	44.094.143,07
42.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Desa Trans Kujau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	428.285
43.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jln. Desa Bebakung		Tanah Milik Pemda	Pembelian	970.346
44.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jln. Desa Menjelutung Kec. Sesayap Hilir		Tanah Milik Pemda	Pembelian	609.086
45.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Desa mendupo		Tanah Milik Pemda	Pembelian	991.424
46.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Baik		Desa Safari Kec. muruk Rian		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.081.013,80
47.	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	Baik		Jl. Tideng Pale, Desa Sebwang, Kec Sesayap		Tanah Milik Pemda	Pembelian	564.328,10
48.	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	Baik		Jln. Tarakan Jaya Kec. Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.026.410
49.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Kujau Kec. Betayau		Tanah Milik Pemda	Pembelian	5.163.843,44
50.	Bangunan Klinik/Puskesmas	Baik		Ds. Belayan Ari Kec. Muruk Rian		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.037.110
51.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		jl. Desa bebatu		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.131.136
52.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Desa Sambungan Selatan Kec. Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.208.234
53.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	37.499.196,51
54.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir. salmon (Dibelakang Pendopo Jafaruddin)		Tanah Milik Pemda	Pembelian	30.339.788,51
55.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafaruddin.		Tanah Milik Pemda	Pembelian	25.078.551,25
56.	Bangunan Rumah Sakit Umum	Baik		Jl. Ir salmon RSU AB di belakang Pendopo Jafarudin		Tanah Milik Pemda	Pembelian	9.453.551,25

57.	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	Baik		Jl. Tarakan Jaya Kec tana lia desa Sambungan Selatan		Tanah Milik Pemda	Pembelian	443.088
58.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Jl. Desa Sambungan, Kecamatan Tana Lia		Tanah Milik Pemda	Pembelian	21.492.534,85
59.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik		Desa Kapuak, Sebelah Paud		Tanah Milik Pemda	Pembelian	431.586

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah juga mengevaluasi seberapa baik kinerja organisasi. Capaian Kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan.

2.3.1. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017-2021. Capaian kinerja Dinas Kesehatan juga dapat dilihat dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan tahun 2017-2020. Berikut disajikan tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2017-2021 dan Pencapaian SPM tahun 2017-2021.

Tabel 2.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Angka Kematian Ibu	per 100.000 Kelahiran Hidup	305	305	305	306	346	488	0	0	195	*401	62,5	0	0	156,9 2	*86,28
2.	Angka Kematian Bayi	per 1.000 Kelahiran Hidup	24	24	24	24	17	21	11	21	8	*12	114,28	218,18	114,28	300	*141,67
3.	Penanganan Bayi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	%	90	90	95	95	95	100	100	100	100	*100	111,11	111,11	105,2 6	105,2 6	*100
4.	Cakupan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	90	95	95	95	95	95	98	100	94,7	NA	105,55	103,16	105,2 6	99,68	NA
5.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	%	80	80	84	88	92	70	104, 67	29,82	28,48	NA	87,5	130, 84	35,5	32,36	NA
6.	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	%	16	33	50	66	100	20	40	80	80	NA	125	121,21	160	121,21	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

*) Data per 31 Agustus 2021

Berdasarkan tabel 2.10. diketahui bahwa capaian indikator kinerja Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017 belum tercapai sesuai target, yakni dari target 305 per 100.000 kelahiran hidup, realisasinya adalah 488 per 100.000 kelahiran hidup. Artinya setiap 100.000 bayi yang dilahirkan, ada 488 ibu yang meninggal karena melahirkan atau kehamilannya. Angka tersebut didapatkan dari hasil perhitungan jumlah ibu yang meninggal dibagi jumlah bayi lahir hidup dikali 100.000 (konstanta untuk angka kematian ibu). Jumlah kasus kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017 adalah sebanyak 2 (dua) kasus. Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 0 (nol) atau tidak ada kasus kematian ibu. Tahun 2020 terdapat 1 (satu) kasus kematian ibu karena melahirkan, dengan Angka Kematian Ibu sebesar 195 per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu tahun 2021 hingga 31 Agustus 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2020, yakni 401 per 100.000 kelahiran hidup dari semula 195 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian ibu sendiri hingga 31 Agustus 2021 sebanyak 2 (dua) kasus. Kondisi pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap peningkatan Angka Kematian Ibu tersebut, sebab 1 (satu) dari 2 (dua) kasus kematian ibu tersebut disebabkan karena ibu terpapar Covid-19.

Angka Kematian Bayi (AKB) didapatkan dari hasil perhitungan jumlah bayi yang meninggal dibagi jumlah bayi lahir hidup dikali 1.000 (konstanta untuk angka kematian bayi). Berdasarkan data pada tabel 2.5. diketahui bahwa Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tana Tidung tahun 2017 hingga tahun 2020 berada dibawah target, artinya upaya untuk menekan angka kematian bayi di Kabupaten Tana Tidung tercapai, meskipun angkanya masih fluktuatif dari tahun ke tahun. Jumlah kasus kematian bayi pada tahun 2017 adalah sebanyak 9 kasus kematian bayi; 5 kasus kematian bayi pada tahun 2018; 9 kasus kematian bayi pada tahun 2019 dan 4 kasus kematian bayi pada tahun 2020. Angka Kematian Bayi pada tahun 2021 berdasarkan data per tanggal 31 Agustus 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2020, yakni 12 per 1.000 kelahiran hidup dari semula 8 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kasus kematian bayi hingga 31 Agustus 2021 sebanyak 6 (enam) kasus.

Capaian indikator kinerja penanganan bayi/balita gizi buruk dan gizi kurang adalah 100% pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Artinya seluruh kasus bayi/balita gizi buruk dan gizi kurang yang ditemukan seluruhnya mendapatkan penanganan sesuai standar. Capaian indikator cakupan penyakit menular dan tidak menular pada tahun 2017 hingga tahun 2019 telah melebihi target, sedangkan pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan yakni 94,7% dari target 95% dengan rasio 99,68%. Meskipun mengalami sedikit penurunan, capaian ini sudah sangat baik (hampir 100%) mengingat kondisi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi hingga saat ini.

Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada tahun 2017 sudah cukup tinggi, yakni 70% dari target 80% dengan rasio capaian sebesar 87,5%. Pada tahun 2018 cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin meningkat menjadi 104,67% dari target 80% dengan rasio 130,84%. Tahun 2019 dan tahun 2020, cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 29,83% dari target 84% di tahun 2019 dan 28,48% dari target 88% di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan perhitungan kunjungan untuk pasien miskin peserta BPJS Kesehatan. Kunjungan pasien peserta BPJS pada tahun 2019 hingga saat ini dihitung berdasarkan *by name by address*, artinya satu orang dihitung satu kunjungan meskipun lebih dari satu kali melakukan kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kunjungan pasien masyarakat miskin peserta BPJS dihitung berdasarkan jumlah kunjungan. Selain itu, rendahnya capaian cakupan pelayanan masyarakat miskin juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Kondisi tersebut menyebabkan adanya pembatasan kunjungan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk kasus-kasus yang tidak darurat dan memerlukan pertolongan medis.

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi hingga tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan. Dari 5 (lima) Puskesmas yang ada di Kabupaten Tana Tidung, 4 (empat) diantaranya telah terakreditasi. Keempat Puskesmas tersebut adalah Puskesmas Tana Lia, Puskesmas Kujau, Puskesmas Sesayap Hilir, dan Puskesmas Tideng Pale. Sementara itu, satu Puskesmas lainnya yakni Puskesmas Muruk Rian ditargetkan terakreditasi pada tahun 2021, namun target tersebut tidak dapat tercapai karena terkendala kondisi pandemi Covid-19 sehingga Kementerian Kesehatan mengeluarkan kebijakan untuk tidak melaksanakan pendampingan maupun survey akreditasi pada tahun 2020 dan 2021. Begitu pula dengan proses akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim yang tidak dapat dilaksanakan sejak tahun 2020. Harapannya tahun 2022, proses akreditasi Puskesmas maupun Rumah Sakit sudah dapat dilaksanakan.

Tabel 2.11.
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017-2021

NO	Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Satuan	Target Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	96,82	91,36	92,87	92,13	NA	96,82	91,36	92,87	92,13	NA
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	%	100	100	100	100	100	57,24	78,86	81,23	84,98	NA	57,24	78,86	81,23	84,98	NA
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	88,37	82,73	79,48	91,15	NA	88,37	82,73	79,48	91,15	NA
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	%	100	100	100	100	100	72,55	70,10	56,68	38,06	NA	72,55	70,10	56,68	38,06	NA
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100	100	100	100	100	NA	18,45	100	100	NA	NA	18,45	100	100	NA
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100	100	100	100	NA	2,90	35,03	6,79	NA	NA	2,90	35,03	6,79	NA
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	%	100	100	100	100	100	73,96	86,96	97,03	39,72	NA	73,96	86,96	97,03	39,72	NA
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	100	100	100	100	8,44	7,26	93,75	5,32	NA	8,44	7,26	93,75	5,32	NA
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100	100	100	100	6,34	7,38	50,25	20,78	NA	6,34	7,38	50,25	20,78	NA
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	100	100	100	100	100	100	47,92	17,30	NA	100	100	47,92	17,30	NA
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	%	100	100	100	100	100	96,15	100	55,88	21,57	NA	96,15	100	55,88	21,57	NA
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	%	100	100	100	100	100	0,68	2,31	12,20	21,31	NA	0,68	2,31	12,20	21,31	NA

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.11. dapat dilihat bahwa capaian indikator SPM bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2017 hingga tahun 2020 sudah tinggi meskipun belum mencapai 100%, yakni di atas 90%. Indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin masih rendah pada tahun 2017 yakni 57,24% dan meningkat setiap tahun hingga 84,98% pada tahun 2020. Belum optimalnya pencapaian indikator SPM untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ini disebabkan karena belum semua ibu bersalin memilih melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Masih ada ibu bersalin di wilayah Kabupaten Tana Tidung yang memilih melahirkan di rumah meskipun sebagian besar ditolong oleh tenaga kesehatan. Selain itu, masih banyak pula ibu bersalin yang melahirkan atau mendapat pelayanan persalinan di luar wilayah kerja Kabupaten Tana Tidung, sehingga tidak masuk ke dalam pencatatan pelayanan kesehatan ibu bersalin pada fasyankes di Kabupaten Tana Tidung. Capaian indikator SPM bidang kesehatan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 belum dapat dihitung karena kegiatan masih dalam tahun berjalan.

Capaian indikator SPM untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2017 hingga 2020 tergolong cukup tinggi namun belum optimal, yakni berada pada rentang 82%-91%. Kondisi ini sebagian besar disebabkan karena masih cukup banyak bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di luar wilayah kerja Kabupaten Tana Tidung, serta pelayanan yang tidak dilaporkan dari jaringan dan fasyankes swasta ke puskesmas. Capaian indikator SPM untuk pelayanan kesehatan balita cukup rendah dan cenderung menurun dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Kondisi ini cenderung disebabkan karena sosial budaya pada masyarakat, sebagai contoh masih ada beberapa masyarakat yang berpandangan tidak ingin memberikan imunisasi bagi anak-anaknya. Selain itu kondisi pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi menurunnya capaian pelayanan kesehatan pada balita, karena tidak dilaksanakannya program-program pelayanan kesehatan di luar gedung seperti posyandu, dan imunisasi di luar gedung demi memutus mata rantai penularan Covid-19.

Capaian indikator SPM lainnya tergolong masih cukup rendah. Pada umumnya hal tersebut disebabkan oleh faktor sosial budaya pada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh fasyankes baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, serta kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir sangat mempengaruhi capaian indikator SPM bidang kesehatan.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017-2020 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.12.
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Rasio Penyerapan Anggaran (%)
1.	2017	97.993.835.000,00	73.325.599.730,00	74,83
2.	2018	42.017.242.848,00	30.746.445.528,80	73,18
3.	2019	73.442.447.483,00	62.916.516.855,00	85,67
4.	2020	96.336.829.988,07	81.233.015.994,00	84,32

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.12. dapat diketahui bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung fluktuatif dari tahun ke tahun. Anggaran Dinas Kesehatan bersumber dari APBD II dan APBN. Anggaran yang bersumber dari APBN terdiri dari DAK Fisik bidang Kesehatan, DAK Non Fisik bidang Kesehatan, DAK Fisik bidang Keluarga Berencana dan DAK Non Fisik bidang Keluarga Berencana. Selain itu anggaran kesehatan juga bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Tana Tidung.

Realisasi anggaran pada tahun 2017 dan 2018 cukup tinggi yakni di atas 70% dari pagu anggaran, sedangkan realisasi untuk tahun 2019 dan 2020 sudah lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni di atas 80%. Anggaran Dinas Kesehatan tahun 2017, 2018 dan 2019 lebih banyak digunakan untuk penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim serta penyediaan sarana dan prasarannya. Anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 sebagian besar bersumber dari APBN (DAK Fisik Bidang Kesehatan) yang dialokasikan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Tana Lia beserta pengadaan alat-alat kesehatannya sebesar Rp. 42.750.000.000,00. Anggaran kesehatan pada tahun 2020 juga banyak digunakan untuk penanganan Covid-19 yakni sebesar Rp. 11.165.211.606,00. Selebihnya anggaran kesehatan banyak digunakan untuk operasional Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim, operasional Puskesmas beserta jaringannya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Rincian penyerapan anggaran per program Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2017-2020 disajikan pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13.
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun 2017-2020

Program	Pagu Anggaran (Rp)				Realisasi Anggaran (Rp)				Rasio Penyerapan Anggaran (%)			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.996.875.900,00	4.369.002.088,00	3.268.446.279,89	6.143.288.389,40	2.721.149.146,00	2.944.385.361,00	2.981.839.771,00	5.435.329.548,00	90,80	67,39	91,23	88,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000,00	301.500.000,00	755.000.000,00	1.887.576.000,00	99.700.000,00	258.672.500,00	683.412.700,00	1.600.155.382,00	99,70	85,80	90,52	84,77
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	285.750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	14.700.000,00	33.250.000,00	-	-	12.886.000,00	4.986.500,00	-	-	87,66	15,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	-	-	-	68.192.210,00	-	-	-	97,42	-	-	-
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.615.664.000,00	981.479.000,00	2.822.724.000,00	3.231.749.500,00	1.253.673.549,00	417.898.692,00	2.129.481.054,00	1.624.752.416,00	77,59	42,58	75,44	50,27
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	4.997.357.300,00	7.113.518.760,00	8.509.381.884,00	6.335.471.968,00	1.822.029.521,00	4.073.684.626,00	5.623.259.154,00	4.546.449.399,00	36,46	57,27	66,08	71,76
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	204.000.000,00	111.500.000,00	254.502.000,00	106.414.000,00	141.604.632,00	-	244.336.810,00	85.755.976,00	69,41	0,00	96,01	80,59
Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	-	74.250.000,00	206.600.000,00	89.140.000,00	-	15.000.000,00	150.015.000,00	-	-	20,20	72,61	0,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	268.450.000,00	22.500.000,00	154.600.000,00	314.428.000,00	115.871.900,00	19.500.000,00	103.850.000,00	167.900.000,00	43,16	86,67	67,17	53,40
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	426.770.000,00	376.550.000,00	885.386.000,00	708.211.628,00	222.184.000,00	221.220.089,00	780.253.022,00	561.182.444,00	52,06	58,75	88,13	79,24
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.248.360.000,00	794.560.000,00	688.850.000,00	500.125.000,00	1.735.103.143,00	423.876.901,00	341.745.800,00	-	77,17	53,35	49,61	0,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pembantu dan jaringannya	14.531.080.600,00	6.148.987.000,00	2.838.845.000,00	834.000.000,00	10.154.826.000,00	3.673.011.000,00	2.021.222.811,00	424.929.401,00	69,88	59,73	71,20	50,95
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	68.998.177.200,00	18.174.306.000,00	47.677.247.320,00	70.830.762.502,67	54.847.550.529,00	16.359.583.897,80	44.169.737.124,00	62.116.994.391,00	79,49	90,01	92,64	87,70

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	-	160.000.000,00	674.500.000,00	516.850.000,00	-	140.396.620,00	249.057.520,00	411.196.251,00	-	87,75	36,92	79,56
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	-	1.900.000.000,00	2.276.900.000,00	2.800.919.000,00	-	1.788.644.842,00	2.106.036.069,00	2.754.440.500,00	-	94,14	92,50	98,34
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	149.500.000,00	72.500.000,00	261.200.000,00	138.170.000,00	78.980.400,00	-	71.426.000,00	125.440.000,00	52,83	0,00	27,35	90,79
Program Keluarga Berencana	1.387.600.000,00	1.130.840.000,00	2.153.565.000,00	1.866.474.000,00	64.734.700,00	410.571.000,00	1.247.958.020,00	1.373.503.786,00	4,67	36,31	57,95	73,59
Total	97.993.835.000,00	42.017.242.848,00	73.442.447.483,89	96.336.829.988,07	73.325.599.730,00	30.746.445.528,80	62.916.516.855,00	81.233.015.994,00	74,83	73,18	85,67	84,32

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Tabel 2.14.
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Tahun 2020

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Realisasi Anggaran (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	6.143.288.389,40	5.435.329.548,00	88,48	92,11
	a) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	6.143.288.389,40	5.435.329.548,00	88,48	92,11
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.887.576.000,00	1.600.155.382,00	84,77	95,13
	a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.364.176.000,00	1.198.277.836,00	87,84	93,26
	b) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	523.400.000,00	401.877.546,00	76,78	100,00
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33.250.000,00	4.986.500,00	15,00	15,04
	a) Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	33.250.000,00	4.986.500,00	15,00	15,04
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	3.231.749.500,00	1.624.752.416,00	50,27	96,55
	a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.956.148.500,00	1.427.191.200,00	48,28	96,62
	b) Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	275.601.000,00	197.561.216,00	71,68	95,87
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.335.471.968,00	4.546.449.399,00	71,76	75,94

	a) Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Rumah Sakit	468.775.200,00	437.475.140,00	93,32	95,09
	b) Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Tideng Pale	740.008.860,00	442.618.940,00	59,81	43,34
	c) Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Sesayap Hilir	625.133.340,00	393.942.063,00	63,02	63,17
	d) Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Tana Lia	559.077.024,00	347.810.038,00	62,21	25,10
	e) Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Kujau	230.274.960,00	149.998.362,00	65,14	10,12
	f) Jasa Pelayanan Kesehatan serta biaya operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dana Kapitasi BPJS Puskesmas Muruk Rian	91.834.584,00	79.887.106,00	86,99	79,53
	g) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tideng Pale	852.356.188,00	454.654.500,00	53,34	88,19
	h) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sesayap Hilir	763.027.313,00	541.294.000,00	70,94	91,39
	i) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tana Lia	449.995.873,00	365.305.000,00	81,18	100,00
	j) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kujau	476.286.073,00	424.781.700,00	89,19	99,73
	k) Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muruk Rian	339.840.553,00	325.408.000,00	95,75	100,00
	l) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) UKM Dinas Kesehatan	169.219.000,00	166.330.000,00	98,29	100,00
	m) Pelayanan jaminan persalinan (Jampersal)	102.786.000,00	62.360.000,00	60,67	62,58
	n) Pemanfaatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dukungan Manajemen Kabupaten/Kota	46.857.000,00	37.644.550,00	80,34	98,93
	o) Penyediaan biaya pendamping rujukan pasien	420.000.000,00	316.940.000,00	75,46	99,76
6	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	106.414.000,00	85.755.976,00	80,59	99,46
	a) Pemberian tambahan makanan dan vitamin	106.414.000,00	85.755.976,00	80,59	99,46
7	Program Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	89.140.000,00	0,00	0	
	a) Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	89.140.000,00	0,00	0	0
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	314.428.000,00	167.900.000,00	53,40	75,70
	a) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	28.190.000,00	0,00	0	7,09
	b) Pemucuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	120.410.000,00	112.050.000,00	93,06	65,03
	c) Pengawasan Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman (TPM)	159.328.000,00	53.900.000,00	33,83	94,92
	d) Pembinaan Kebugaran Haji	6.500.000,00	1.950.000,00	30,00	100,00
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	708.211.628,00	561.182.444,00	79,24	78,41

	a) Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	567.811.628,00	456.197.444,00	80,34	78,49
	b) Pengiriman dan Pengambilan Vaksin	20.200.000,00	18.985.000,00	93,99	93,99
	c) Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kaki Gajah	91.200.000,00	86.000.000,00	94,30	100,00
	d) Penanggulangan Penyakit Berpotensi Kejadian Luar Biasa dan Wabah	29.000.000,00	0,00	0	0
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	500.125.000,00	0,00	0	0
	a) Akreditasi Puskesmas	500.125.000,00	0,00	0	0
11	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	834.000.000,00	424.929.401,00	50,95	65,83
	a) Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	834.000.000,00	424.929.401,00	50,95	65,83
12	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	70.830.762.502,67	62.116.994.391,00	87,70	96,46
	a) Pembangunan rumah sakit	57.270.089.005,67	50.989.627.315,00	89,03	95,89
	b) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	5.974.472.777,00	4.303.726.657,00	72,04	100,00
	c) Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit	1.633.675.000,00	1.439.658.638,00	88,12	100,00
	d) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	36.725.000,00	36.500.000,00	99,39	100,00
	Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit	583.300.000,00	454.928.370,00	77,99	91,57
	e) Pengadaan Jasa Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi dan Tenaga kesehatan lainnya	2.733.400.720,00	2.683.318.000,00	98,17	99,14
	f) Pengadaan Jasa Pengadministrasian, Kebersihan dan Keamanan Rumah sakit	1.257.600.000,00	1.228.800.000,00	97,71	100,00
	g) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik Rumah Sakit	700.900.000,00	477.998.116,00	68,20	100,00
	h) Pengadaan Alat Tulis Kantor Rumah Sakit	79.000.000,00	78.789.755,00	99,73	100,00
	i) Pengadaan makan dan minum rumah sakit	202.500.000,00	153.061.840,00	75,59	100,00
	j) Penyediaan Peralatan Kantor Rumah Sakit	259.100.000,00	170.837.700,00	65,94	69,12
	k) Penyediaan Peralatan Kebersihan Rumah Sakit	100.000.000,00	99.748.000,00	99,75	100,00
13	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	516.850.000,00	411.196.251,00	79,56	92,65
	a) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	134.600.000,00	124.031.901,00	92,15	100,00
	b) Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah	75.000.000,00	29.054.350,00	38,74	100,00
	c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit	241.250.000,00	192.110.000,00	79,63	84,25
	d) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana rumah sakit	66.000.000,00	66.000.000,00	100,00	100,00

14	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	2.800.919.000,00	2.754.440.500,00	98,34	100,00
	a) Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	2.800.919.000,00	2.754.440.500,00	98,34	100,00
15	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	138.170.000,00	125.440.000,00	90,79	99,64
	a) Pelatihan ANC Berkualitas	61.290.000,00	57.900.000,00	94,47	100,00
	b) Pelaksanaan Kelas Ibu Balita	76.880.000,00	67.540.000,00	87,85	99,35
16	Program Keluarga Berencana	1.866.474.000,00	1.373.503.786,00	73,59	99,57
	a) Bantuan Operasional Keluarga Berencana	856.818.000,00	443.195.400,00	51,73	99,07
	b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.009.656.000,00	930.308.386,00	92,14	100,00
Total		96.336.829.988,07	81.233.015.994,00	84,32	93,88

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 2.14. dapat dijelaskan bahwa penyerapan anggaran Dinas Kesehatan pada tahun 2020 sebesar 84,32%. Hal tersebut diketahui dari total pagu anggaran Dinas Kesehatan tahun 2020 sebesar Rp. 96.336.829.988,07 (Sembilan Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Koma Nol Tujuh Rupiah), dapat direalisasikan sebesar Rp. 81.233.015.994,00 (Delapan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah). Realisasi fisik pada tahun 2020 adalah sebesar 93,88%. Berdasarkan data tersebut, realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan diketahui efisiensi anggaran sebesar 1,11%. Artinya tiap 1% realisasi anggaran rata-rata dapat menghasilkan realisasi fisik sebesar 1,11%. Dengan demikian, Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya telah bertindak secara efisien dalam penggunaan anggaran.

Tinggi rendahnya penyerapan anggaran pada tahun 2020 dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Adanya beberapa kali *refocusing* dan *realokasi* anggaran yang terjadi akibat dari kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah melakukan penyesuaian anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19. Hal tersebut mengakibatkan beberapa program dan kegiatan mengalami pengalihan alokasi anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal.
2. Beberapa program dan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang terpaksa tidak dapat dilaksanakan guna mencegah atau menghindari penularan kasus Pandemi Covid-19. Sebagai contoh kegiatan Akreditasi Puskesmas pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk dilakukan penundaan pelaksanaan hingga tahun berikutnya. Hal ini menyebabkan tidak adanya realisasi atau penyerapan anggaran pada program dan kegiatan tersebut. Begitu pula dengan Program Promosi Kesehatan yang realisasi anggarannya adalah 0 (nol). Hal ini dikarenakan kegiatan yang akan dilaksanakan bersifat mengumpulkan banyak orang atau membuat kerumunan yang berpotensi untuk menjadi tempat penyebaran dan penularan kasus Covid-19 sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Selama pandemic Covid-19, kegiatan promosi kesehatan lebih banyak dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

2.4.1. Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a. Kondisi Pandemi Covid-19 yang belum berakhir
- b. Kurangnya minat dokter spesialis untuk bertugas di Kabupaten Tana Tidung
- c. Kebutuhan anggaran yang besar untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
- d. Ketersediaan peralatan kesehatan di Rumah Sakit yang masih kurang lengkap
- e. Pola hidup masyarakat yang kurang baik.
- f. Kelas Rumah Sakit Umum Daerah yang masih D Pratama.
- g. Rumah Sakit Umum Daerah belum terakreditasi.
- h. Belum seluruh Puskesmas terakreditasi.
- i. Belum optimalnya penerapan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan.
- j. Kendala akses jaringan internet yang masih sulit di beberapa wilayah kerja Puskesmas.

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Dinas Kesehatan untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Adanya dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui DAK Fisik dan Non Fisik bidang kesehatan dan Keluarga Berencana;
- b. Tarif pelayanan RS sangat terjangkau untuk pasien umum dan juga melayani pasien dari asuransi kesehatan lainnya;
- c. Gedung ruangan yang tersedia mampu menampung kegiatan rawat jalan dan rawat inap;
- d. Potensi pengembangan sarana pelayanan kesehatan masih sangat memungkinkan;
- e. Tersedia pelayanan gawat darurat 24 jam di seluruh Puskesmas;

- f. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator dan peraturan perundangan bidang kesehatan;
- g. Tersedianya infrastruktur/perangkat sistem informasi di semua Puskesmas.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Derajat Kesehatan masyarakat memberikan sumbangan yang nyata dalam meningkatkan daya saing bangsa. Pembangunan kesehatan perlu diupayakan dan diperjuangkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan seluruh komponen bangsa di pusat dan daerah. Penyusunan rencana pembangunan kesehatan dimaksudkan agar program pelayanan kesehatan selaras dengan pembangunan lingkungan dan perubahan perilaku pola hidup sehat. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan pada lima tahun mendatang.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Kesehatan, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan penentuan isu-isu strategis Dinas Kesehatan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung serta setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kesehatan, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Kesehatan yaitu: “Belum optimalnya status kesehatan masyarakat serta mutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Tana Tidung” yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Masih terdapat kasus kematian ibu dan bayi di Kabupaten Tana Tidung	Kualitas pelayanan kesehatan ibu yang belum memadai
		Belum semua ibu bersalin melahirkan di fasilitas kesehatan
		Belum semua ibu nifas mendapat layanan berkualitas
		Belum semua neonatal mendapat pelayanan berkualitas

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
2	Gizi buruk dan stunting yang masih terjadi di masyarakat	Rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani
		Belum meratanya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih
3	Belum meratanya jumlah, jenis, dan mutu sumber daya manusia di bidang kesehatan	Perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan khususnya tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara optimal
		Pelayanan spesialistik belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat
		Masih kurangnya pembinaan terhadap mutu/kualitas tenaga kesehatan
		Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan
		Belum meratanya sebaran tenaga kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan
		Penempatan SDM belum sesuai dengan beban kerja
4	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular	Faktor metabolik (tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, obesitas, dislipidemia, gangguan fungsi ginjal, malnutrisi pada maternal dan anak); faktor perilaku (perilaku diet, merokok, risiko kesehatan kerja, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol); dan faktor lingkungan (polusi udara, kekerasan, kemiskinan)
		Pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik
5	Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam penerapan PHBS
		Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya ber-PHBS
		Kurangnya perhatian dan peran aktif tokoh masyarakat dalam masalah kesehatan di masyarakat
6	Pencegahan dan penanggulangan penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) belum sesuai standar	Kurangnya jumlah dan kapasitas tenaga surveilans dalam pelacakan dan respon kasus berpotensi KLB dan Wabah
		Kurangnya sarana prasarana dalam rangka pelacakan dan respon kasus di tingkat kabupaten
7	Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan di fasyankes	Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan di Puskesmas masih ada yang belum memenuhi standar

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
		Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar.
		Kurangnya ketersediaan SDM (dokter spesialis) di Rumah Sakit
		Kurangnya keterampilan dan kompetensi tenaga kesehatan
		Rendahnya kompetensi tenaga Dinas Kesehatan dan RS terkait akreditasi RS
		Keterbatasan SDM di Rumah Sakit untuk memenuhi standar minimal sesuai klasifikasi jenis RS
		Sistem data dan informasi belum terintegrasi secara optimal

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat dikembangkan indikasi tujuan sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian, untuk merumuskan isu-isu strategis diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan, Telaah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, serta Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tana Tidung serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Tana Tidung menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tana Tidung baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Tana Tidung untuk periode 2021-2026 sebagai berikut:

“Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”

Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tan Tidung Tahun 2021-2026 tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dasar yang terpadu tata ruang wilayah
3. Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang Berkerakyatan berbasis Sumber Daya Alam
4. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup
5. Meningkatkan Kemandirian Desa
6. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
7. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban wilayah

Berdasarkan identifikasi visi misi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung mendukung dan berkontribusi dalam upaya melaksanakan misi ke-1 (kesatu) yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-1 adalah “Mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing menuju KTT PINTAR dan KTT SEHAT”. Dalam upaya mewujudkan pembangunan dalam bidang kesehatan, maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Kesehatan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud KTT Sehat”.

Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung secara langsung berkontribusi membantu Bupati dalam mencapai target pembangunan kesehatan dengan indikator Indeks Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya berperan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan kesehatan di Kabupaten Tana Tidung yaitu peningkatan kapasitas sumberdaya dan kualitas layanan kesehatan menuju KTT SEHAT. Strategi atau prioritas pembangunan tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memastikan upaya perwujudan standar kesehatan masyarakat dengan fasilitas kesehatan (terakreditasi) dan tenaga kesehatan (spesialisasi) yang didukung sistem informasi terintegrasi.
2. Peningkatan pelayanan penanganan/pemulihan kesehatan COVID-19, dan kesehatan ibu hamil, pencegahan stunting dan penyakit menular lainnya.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak lepas dari kebijakan yang diluncurkan oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan Kemenkes sangat berpengaruh terhadap kebijakan kesehatan di daerah. Sasaran Indikator Kemenkes juga merupakan sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Kementerian Kesehatan tahun 2019-2024 dalam dokumen renstranya menetapkan dua tujuan yaitu: 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat; dan 2) Meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

Setiap Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki kontribusi dalam upaya peningkatan status kesehatan masyarakat dengan indikator secara nasional yang akan dicapai adalah:

- a. Menurunnya angka kematian ibu dari 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup;
- b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
- c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%;
- d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
- e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Dua dari lima tujuan di atas, saat ini telah diintegrasikan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dengan penyesuaian target di tingkat Kabupaten. Tiga tujuan lainnya juga telah menjadi indikator kinerja pendukung dalam hal pencapaian IKU dan SPM bidang kesehatan.

Tujuan dua dari Renstra Kementerian Kesehatan 2019-2024 yakni meningkatnya daya tanggap (*responsiveness*) dan perlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan, memiliki ukuran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%; dan
- b. Meningkatnya indeks *responsiveness* terhadap pelayanan kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00.

Upaya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dari kriteria pengukuran ini adalah dengan menetapkan cakupan kepesertaan JKN sebagai indikator kinerja yang pembiayaannya selain dari peserta mandiri juga melalui APBD II, APBD I dan APBN.

Arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam renstra 2019-2024 mengacu pada 3 (tiga) hal penting yakni :

1. Penguatan Pelayanan Kesehatan Primer (*Primary Health Care*).

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan (faskes) yang berperan penting dalam penguatan ini dengan 4 jenis upaya yaitu: meningkatkan dan memberdayakan masyarakat; melaksanakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM); melaksanakan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP); dan memantau dan mendorong pembangunan berwawasan kesehatan.

2. Penerapan Pendekatan Keberlanjutan Pelayanan (*Continuum of Care*).

Pendekatan ini dilaksanakan melalui peningkatan cakupan, mutu, dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja, dan usia lanjut. Tindak lanjut dari pendekatan ini yaitu adanya penetapan SPM kesehatan melalui peraturan menteri kesehatan, di mana penerapan SPM kesehatan merupakan bagian dari penilaian kinerja kepala daerah.

3. Intervensi Berbasis Risiko Kesehatan.

Acuan ini dijalankan melalui program-program khusus untuk menangani permasalahan kesehatan pada bayi, balita dan lansia, ibu hamil, pengungsi, dan keluarga miskin, kelompok-kelompok berisiko, serta masyarakat di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu: “Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan pendidikan wajib belajar 16 tahun dan berwawasan.

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, untuk mencapai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata”.

RENSTRA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021-2026

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan. Guna keperluan pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak;
- b. Meningkatnya perluasan akses dan mutu serta pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- c. Menurunnya angka kesakitan.

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara tersebut telah selaras dengan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Sebagian besar indikator kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara juga digunakan sebagai indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dengan penyesuaian target di daerah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kesehatan. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Kesehatan dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung, dalam pelaksanaannya tidak berpotensi melakukan pelanggaran dan keterkaitan/implikasi terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tana Tidung.

3.6. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan KLHS isu yang

terkait dengan Dinas Kesehatan adalah terkait isu pilar sosial, dengan tujuan mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Tabel 3.2
Tema Isu KLHS Kabupaten Tana Tidung Terkait Dinas Kesehatan

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Pilar Sosial	Pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi dan kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Berdasarkan hasil KLHS, isu Pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi menjadi salah satu tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Kesehatan. Permasalahan terkait isu tersebut antara lain adalah Pelayanan kesehatan dasar pada ibu melahirkan dan bayi dan kelembagaan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih minim; Masih adanya kasus gizi buruk dan stunting. Sasaran strategis dari permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kampanye Program Keluarga Berencana;
- b. Meningkatkan akses pelayanan KB;
- c. Layanan bagi ibu menyusui dalam program ASI Eksklusif;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan bagi masyarakat;
- e. Perbaikan gizi pangan masyarakat;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola makan anak yang berkualitas.

Rekomendasi yang diberikan dari hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyediaan pelayanan KB dan kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin;
- b. Pengadaan alat kontrasepsi;
- c. Pembinaan Keluarga Berencana dan pemberian layanan konseling KB;
- d. Perbaikan gizi masyarakat;
- e. Penguatan kelembagaan pangan dan gizi;
- f. Pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- g. Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
- h. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi;
- i. Pembinaan kesehatan anak balita;

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara, telaahan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 dan telaahan kajian lingkungan hidup strategis, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Kesehatan sebagai berikut:

1. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19.
2. Penurunan AKI dan AKB.

Berdasarkan data di Kabupaten Tana Tidung, Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) masih fluktuatif. Angka Kematian Ibu meningkat dari tahun 2018 dan 2019 ke tahun 2020 dari 0 menjadi 195 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan Angka Kematian Ibu belum optimal. Angka Kematian Bayi meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 dari 11 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 21 per 1.000 kelahiran hidup, dan menurun pada tahun 2020 menjadi 8 per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menekan AKB sudah menunjukkan kemajuan.

3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Prevalensi penyakit menular dan penyakit tidak menular dapat menjadi masalah besar apabila tidak dilakukan pencegahan dan pengendalian secara serius. Prevalensi penyakit menular serta ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.

4. Prevalensi stunting

Kasus jumlah balita status gizi buruk dan Prevalensi stunting tetap menjadi isu penting. Meskipun prevalensi stunting di Kabupaten Tana Tidung masih di bawah angka Provinsi dan Nasional, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kenaikan kasus apabila tidak mendapat perhatian dan penanganan serius.

5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga dikarenakan tenaga kesehatan lebih banyak terkonsentrasi di pusat kota.
6. Pelayanan spesialisik belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

7. Belum dimanfaatkannya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan Kesehatan. Pemanfaatan TIK di bidang kesehatan masih belum optimal dimana data kesehatan belum terintegrasi.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan dengan baik dapat berpengaruh pada kualitas hidup masyarakat. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk apabila tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat berujung pada status kesehatan masyarakat yang buruk. Usia perkawinan dan usia ibu melahirkan serta jarak antara kelahiran anak yang satu dengan lainnya juga sangat mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan arahan dari Bappeda Kabupaten Tana Tidung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa tujuan dan sasaran setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kabupaten Tana Tidung berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Perumusan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung tahun 2021-2026. Berdasarkan visi misi tersebut maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kesehatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang membantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang kesehatan. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung adalah: **“Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)”**. Dalam rangka mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tan Tidung Tahun 2021-2026 tersebut, telah dirumuskan 7 (tujuh) misi dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung mendukung dan berkontribusi dalam upaya

RENSTRA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021-2026

melaksanakan misi ke-1 (kesatu) yakni “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas”. Tujuan dari pelaksanaan misi ke-1 adalah “Mewujudkan masyarakat yang unggul dan berdaya saing menuju KTT PINTAR dan KTT SEHAT”. Dalam upaya mewujudkan pembangunan dalam bidang kesehatan, maka sasaran yang harus dipenuhi Dinas Kesehatan untuk pencapaian tujuan tersebut adalah sasaran kedua yaitu “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat sebagai wujud KTT Sehat”.

Sejalan dengan tujuan dan sasaran RPJMD tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Berkelanjutan”. Dalam hal pengukuran ketercapaian tujuan pembangunan perangkat daerah, diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai. Sasaran untuk tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya status kesehatan masyarakat;
- b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Data Awal (capaian 2020)	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
							2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan	Usia Harapan Hidup			Tahun	71,42	71,44	71,45	71,46	71,48	71,50
			Meningkatnya status kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	*401	334	143	125	112	100
				Angka Kematian Bayi	Per 1.000 kelahiran hidup	*12	15	11	9	8	7
				Angka Kesakitan	%	19,37	19,50	19,40	19,30	19,20	19,10
			Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	79,96	80,25	80,75	81,25	81,75	82,25

*) Data per tanggal 31 Agustus 2021

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1.1. Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

5.1.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna

mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026.

Berdasarkan permasalahan serta isu strategis yang telah dikemukakan dalam Bab III, dikaitkan dengan target-target solusi yang dirumuskan dalam tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana diuraikan dalam Bab IV, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Strategi dan Kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi (RPJMD)	:	Terwujudnya Tana Tidung Bermartabat, Sejahtera, Indah dan Humanis (BERSIH)									
Misi ke-1 (RPJMD)	:	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas									
Tujuan		Sasaran		Strategi (Prioritas)		Arah Kebijakan	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Merata dan Berkelanjutan	1	Meningkatnya status kesehatan masyarakat	1	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	1	Penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah Kabupaten/Kota					
	2	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan			2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
					3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi					
					4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					

			2	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan						
					2	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan						
			3	Pemenuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						
					2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT						
					3	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM						
					4	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						
			4	Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	1	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor						
					2	Pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif						

				3	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM)					
			5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk				
					2	Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				
					3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat, dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2021-2026) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Tana Tidung 2021 - 2026.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Rencana program Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah (RPJMD) maupun untuk pemenuhan layanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar kesehatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan oleh Dinas Kesehatan dalam penyusunan renstra tahun 2021-2026, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Program prioritas untuk mendukung pelayanan Dinas Kesehatan pada periode Tahun 2021-2026 terdiri dari 8 program, 29 kegiatan, dan 104 sub kegiatan. Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan
Kabupaten Tana Tidung

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Serta Kerangka Pendanaan									
							2022		2023		2024		2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan	1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat	- Angka Kematian Ibu - Angka Kematian Bayi - Angka Kesakitan	010201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelaksanaan administrasi, penatausahaan keuangan serta sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	51.317.000.000	100	53.707.000.000	100	55.932.000.000	100	58.132.000.000	100	60.257.000.000
	2. Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat	010201201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan dokumen pelaporan realisasi kinerja (Dengan Satuan:Dokumen)	10	11	310.000.000	11	315.000.000	11	325.000.000	11	325.000.000	11	325.000.000
			010201201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	6	6	135.000.000	6	140.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000
			010201201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kegiatan koordinasi/pertemuan penyusunan dokumen RKA (Dengan Satuan:Kali)	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000
			010201201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan laporan tahunan yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	4	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000	5	150.000.000
			010201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan (Dengan Satuan:orang)	334	344	45.680.000.000	344	47.080.000.000	344	49.770.000.000	344	52.945.000.000	354	53.170.000.000
			010201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	44.650.000.000	12	46.000.000.000	12	48.640.000.000	12	51.800.000.000	12	52.000.000.000
			010201202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	900.000.000	12	950.000.000	12	1.000.000.000	12	1.025.000.000	12	1.050.000.000
			010201202004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah kegiatan Rekonsiliasi yang dilaksanakan	0	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000

010201202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun (dengan satuan: dokumen)	12	12	80.000.000	12	80.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000
010201203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi, penyusunan rencana kebutuhan barang dan administrasi barang perangkat daerah (Dengan Satuan: kegiatan)	0	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000	0	150.000.000
010201203001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah barang yang direncanakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
010201203002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah aset yang diamankan (dengan satuan: unit)			50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000
010201203005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000
010201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan peningkatan kualitas SDM (Dengan Satuan:orang)	334	344	310.000.000	344	320.000.000	344	320.000.000	344	320.000.000	354	320.000.000
010201205002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan (Dengan Satuan:Pasang)	0	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000	60	90.000.000
010201205004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah aplikasi kepegawaian (Dengan Satuan:aplikasi)	0	0	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
010201205005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan Monitoring, Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Kali)	0	2	20.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000
010201205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, workshop, kursus, dll (Dengan Satuan:orang)	0	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000
010201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kantor dan fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi kebutuhan penunjang administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Unit)	6	7	1.987.000.000	7	2.187.000.000	7	2.237.000.000	7	2.287.000.000	7	2.287.000.000
010201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan perluasan/perbaikan/pemasangan jaringan listrik (Dengan Satuan:Unit)	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
010201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000

		yang tersedia (Dengan Satuan:Jenis)											
010201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang diadakan (Dengan Satuan:paket)	0	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000
010201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang diadakan (Dengan Satuan:Paket)	0	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000
010201206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang tersedia (Dengan Satuan:Eksemplar)	0	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000	6	12.000.000
010201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:Kali)	0	150	1.500.000.000	150	1.700.000.000	150	1.750.000.000	150	1.800.000.000	150	1.800.000.000
010201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Penunjang perkantoran (Dengan Satuan:Unit)	0	10	480.000.000	11	1.130.000.000	10	480.000.000	10	1.130.000.000	10	1.130.000.000
010201207001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Operasional roda dua yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	-	0	-	0	-	1	500.000.000	0	-
010201207002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Operasional yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	-	1	650.000.000	0	-	0	-	0	-
010201207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana (Dengan Satuan:Jenis)	0	10	480.000.000	10	480.000.000	10	480.000.000	10	630.000.000	10	1.130.000.000
		Jumlah BBM Dinas Kesehatan, Puskesmas dan IFK (Dengan Satuan:Liter)	0	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
010201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan administrasi dan pelayanan perkantoran (Dengan Satuan:Unit)	6	7	1.870.000.000	7	1.995.000.000	7	2.120.000.000	7	445.000.000	7	2.345.000.000
010201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah meterai yang tersedia (Dengan Satuan:lembar)	1500	2000	20.000.000	2000	20.000.000	2000	20.000.000	2000	20.000.000	2000	20.000.000
010201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik, Air, Telepon/Internet Dinas Kesehatan, Puskesmas, IFK dan Rumah Sakit Pratama (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	350.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	12	425.000.000
010201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Tenaga	12	12	1.500.000.000	12	1.600.000.000	12	1.700.000.000	12	1.800.000.00	12	1.900.000.000

		Tidak Tetap (Dengan Satuan:Bulan)											
010201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara (Dengan Satuan:Tahun)	0	0	530.000.000	0	530.000.000	0	530.000.000	0	530.000.000	0	530.000.000
010201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Dinas kesehatan dan Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan, yang dibayarkan pajaknya (Dengan Satuan:Unit Kendaraan)	0	18	220.000.000	18	220.000.000	18	220.000.000	18	220.000.000	18	220.000.000
010201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor (Dengan Satuan:Kali)	0	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
010201209011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan kantor Dinas kesehatan , IFK dan Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan (Dengan Satuan:Paket)	0	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000	2	60.000.000
010202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1.000 kelahiran hidup)	7,8	7	61.369.468.874	6,5	58.305.085.123	6	56.041.038.830	5,5	54.003.412.300	5	52.395.764.439
		Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:per 1.000 kelahiran hidup)	5,8	5,5		5		4,5		4		4	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (Dengan Satuan:%)	94	95		95,5		96		96,5		96,8	
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (Dengan Satuan:%)	92,1	95		95		95		95		95	
		Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Dengan Satuan:%)	56	70		75		80		82		85	
		Persentase pelayanan Kesehatan Usia Produktif (Dengan Satuan:%)	6,8	100		100		100		100		100	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (Dengan Satuan:%)	5,3	100		100		100		100		100	
		Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (Dengan Satuan:%)	20,7	100		100		100		100		100	

		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Dengan Satuan:%)	17,30	100		100		100		100		100	
		Persentase Kasus KLB/Berpotensi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100	
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Dengan Satuan:%)	21,60	100		100		100		100		100	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi (Dengan Satuan:%)	66,67	71,43		85,71		85,71		85,71		100	
		Cakupan masyarakat memiliki jaminan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100		100		100		100		100	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial >85% (Dengan Satuan:%)	80	100		100		100		100		100	
		Persentase sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	60	70		75		80		85		90	
010202201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				36.427.690.014		32.716.760.007		30.390.700.002		29.616.150.008		29.513.150.008
010202201001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia (Dengan Satuan:Paket)	1	3	10.000.000.000	2	8.092.260.001	2	5.134.850.000	2	5.000.000.000	2	4.500.000.000
010202201003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun	0	1	582.840.001	1	603.070.001	1	605.390.000	1	445.130.000	1	429.800.001
010202201004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang terbangun (Dengan Satuan:Unit)	0	2	1.165.680.001	2	1.206.150.001	2	605.390.000	2	4.154.570.000	2	4.011.500.001
010202201005	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	13.313.760.001	0	10.000.000.000	1	11.210.780.000	0	6.870.220.000	0	6.961.440.001
010202201008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan gedung (Dengan Satuan:Unit)	1	1	291.420.001	1	904.610.000	1	302.690.000	1	593.510.001	2	859.600.000
010202201009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan gedung (Dengan Satuan:Unit)	0	1	437.130.001	1	452.300.000	1	121.070.000	1	118.700.000	1	286.530.000

010202201010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	291.420.001	2	301.530.000	2	302.690.000	2	296.750.001	2	286.530.000
010202201011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	116.560.001	1	120.610.000	1	121.070.000	1	118.700.000	1	114.610.001
010202201012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Ambulance dan Kendaraan Puskesmas Keliling yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	0	1	582.840.001	1	603.070.001	1	605.390.000	1	593.510.001	1	573.070.001
010202201013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	3	1	582.840.001	1	452.300.000	1	605.390.000	1	445.130.000	0	286.530.000
010202201014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:%)	60	70	5.828.440.001	75	6.030.750.001	80	6.053.940.001	85	5.935.110.001	90	5.730.720.000
010202201016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial >85% (Dengan Satuan:Puskesmas)	4	5	1.165.680.001	5	1.507.680.001	5	1.816.180.000	5	2.077.280.001	5	2.292.280.001
010202201017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi kebutuhan dan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (Dengan Satuan:Puskesmas)	5	5	1.165.680.001	5	1.507.680.001	5	1.816.180.000	5	1.780.530.001	5	2.005.750.000
010202201018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan, Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	291.420.001	1	301.530.000	1	302.690.000	1	415.450.000	1	429.800.001
010202201019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	174.850.000	1	180.920.000	1	181.610.001	1	178.050.001	1	171.920.000
010202201020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Alat Kesehatan yang terpelihara (Dengan Satuan:%)	5	10	437.130.001	15	452.300.000	20	605.390.000	25	593.510.001	30	573.070.001
010202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang terakreditasi (Dengan Satuan:Fasyankes)	4	4	24.498.828.858	5	25.033.515.113	6	25.099.448.825	6	23.808.612.291	6	22.289.514.429
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan UKM dan UKP (Dengan Satuan:puskesmas)	5	5		5		5		5		5	
010202202001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pelacakan Ibu Hamil K4 (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	4	116.568.847	4	120.615.101	4	121.078.821	4	118.702.287	4	114.614.423

010202202002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Orientasi P4K (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	145.710.001	5	150.760.001	5	136.210.001	5	118.700.000	5	114.610.001
010202202003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	69.940.000	5	75.380.000	5	72.640.000	5	74.180.000	5	71.630.000
010202202004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Balita (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	72.850.000	5	75.380.000	5	72.640.000	5	71.220.000	5	71.630.000
010202202005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia, Pendidikan Dasar	Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	58.280.001	5	60.300.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000
010202202006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia produktif (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	58.280.001	5	60.300.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000
010202202007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada usia lanjut (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	58.280.001	5	60.300.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000
010202202008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita, Hipertensi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi sesuai standar (Dengan Satuan:Unit)	0	6	87.420.000	7	75.380.000	7	90.800.000	7	74.180.000	7	71.630.000
010202202009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabetes Melitus sesuai Standar (Dengan Satuan:Unit)	0	6	87.420.000	6	90.460.000	7	90.800.000	7	94.960.000	7	91.690.000
010202202010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan pada Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	58.280.001	5	60.300.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000
010202202011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberculosis sesuai standar (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	78.680.001	5	78.390.001	5	75.670.001	5	77.150.000	5	74.490.000

010202202012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sesuai standar (dengan satuan: Puskesmas)	0	5	69.940.000	5	72.360.001	5	72.640.000	5	74.180.000	5	71.630.000
010202202013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada kondisi KLB (dengan satuan: kecamatan)		5	58.280.001	5	60.300.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000
010202202015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK yang mendapat makanan tambahan (Dengan Satuan:%)	0	80	174.850.000	85	180.920.000	90	211.880.001	95	207.720.001	100	200.570.001
		Persentase Balita Kurus yang mendapat makanan tambahan (Dengan Satuan:%)	0	85		90		95		100		100	
010202202016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	46.620.000	5	54.270.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000
010202202017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengo;ahan limbah medis sesuai s t a n d a r (D e n g a n Satuan:Fasyankes)	0	2	58.280.001	3	90.460.000	4	121.070.000	5	148.370.000	7	143.260.000
		Jumlah Desa yang telah terverifikasi Desa Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (Dengan Satuan:desa)	0	5		10		24		32		32	
		Jumlah sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minum (Dengan Satuan:sarana air minum)	1505	1700		1900		2000		2150		2395	
010202202020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dengan Satuan:Puskesmas)	5	5	87.420.000	5	105.530.001	5	108.970.000	5	118.700.000	5	128.940.001
010202202022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa dan NAPZA (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	3	72.850.000	4	90.460.000	5	90.800.000	5	94.960.000	5	91.690.000
010202202023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan khusus (Dengan Satuan:Puskesmas)	0	5	58.280.001	5	60.300.001	5	60.530.000	5	59.350.000	5	57.300.000

010202202025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Pengambilan Vaksin Rutin (dengan satuan: kali)		8	233.130.000	8	271.380.000	8	302.690.000	8	296.750.001	8	257.880.000
010202202026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan meningkat (Dengan Satuan: Jiwa)	7400	7400	2.039.950.001	8200	2.231.370.000	8600	2.300.490.001	9000	2.314.690.000	9400	2.292.280.001
010202202028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Sample yang dikirim dan diperiksa ke Lab Rujukan/Nasional (dengan satuan: paket)		20	87.420.000	20	90.460.000	20	90.800.000	20	89.020.000	20	85.960.001
010202202029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Tatanan yang dilaksanakan	0	0	-	2	12.060.000	3	12.100.000	2	11.870.000	2	11.460.000
010202202032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang mendapatkan biaya operasional (dengan satuan: Unit)	1	1	16.319.630.000	1	16.283.030.000	2	15.740.240.000	2	14.244.270.001	2	12.607.580.001
010202202033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Dengan Satuan: Puskesmas)	5	5	2.788.480.001	5	3.221.520.001	5	3.540.450.000	5	3.748.090.001	5	3.871.110.000
010202202034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pelayanan Dokter Keliling yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000	21	1.000.000.000
010202202035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi (Dengan Satuan: Puskesmas)	4	3	511.990.000	1	301.530.000	2	423.770.000	3	415.450.000	3	515.760.000
010202203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Fasyankes yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Satuan: Fasyankes)	0	6	93.250.000	6	162.820.001	6	127.130.001	6	133.530.000	6	134.660.001
010202203001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah laporan data dan informasi kesehatan (dokumen)	2	2	93.250.000	2	102.520.000	2	108.970.000	2	112.760.000	2	114.610.001
010202203002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Fasyankes yang memiliki sistem informasi terintegrasi (dengan satuan: fasyankes)		5	-	6	60.300.001	6	18.160.001	6	20.770.000	7	20.050.000
010202204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapatkan izin operasional (Satuan: Unit)	6	7	349.700.002	7	391.990.002	7	423.760.002	7	445.120.001	7	458.440.001
010202204003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Naskah Akademis Penyusunan Perda Pola Tarif Puskesmas (dengan satuan: Dokumen)	0	1	145.710.001	1	150.760.001	1	151.340.001	1	148.370.000	1	143.260.000
010202204004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan pendamping rujukan (Dengan Satuan: Orang)		75 Kali	203.990.001	85 Kali	241.230.001	95 Kali	272.420.001	105 Kali	296.750.001	110 Kali	315.180.001

010203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase ketersediaan SDMK sesuai standar (Dengan Satuan:%)	75	100	2.168.350.002	100	2.484.640.003	100	2.549.870.002	100	2.559.200.001	100	2.515.760.002
		Persentase SDM mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100	
010203201	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				73.720.001		96.480.001		98.060.001		93.170.001		85.950.002
010203201001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi izin praktik (dengan satuan: orang)			-		24.120.000		21.180.000		18.990.001		17.190.001
010203201002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Pembinaan dan pengawasan perizinan praktik tenaga kesehatan (dengan satuan: kali)	0	4	73.720.001	4	72.360.001	4	76.880.001	4	74.180.000	4	68.760.001
010203202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasyankes yang memiliki ketersediaan SDMK sesuai standar (dengan satuan fasyankes)		4	1.992.740.000	4	2.291.670.002	5	2.361.010.001	5	2.374.040.000	5	2.349.580.000
010203202001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah bulan pembayaran gaji tenaga kontrak Nakes di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:Bulan)	12	12	1.392.740.000	12	1.931.370.000	12	1.900.480.000	12	1.914.690.000	12	1.992.280.000
010203202002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pelatihan, workshop sesuai profesi (Dengan Satuan:Orang)	0	30	500.000.000	30	300.000.000	30	400.000.000	30	400.000.000	30	300.000.000
010203202003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan pembinaan dan seleksiTenaga Kesehatan Teladan (Dengan Satuan:Orang)	0	30	100.000.000	30	60.300.002	30	60.530.001	30	59.350.000	30	57.300.000
010203203	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM bersertifikat profesi (dengan satuan: orang)		300	101.890.001	310	96.490.000	320	90.800.000	330	91.990.000	350	80.230.000
010203203001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sesuai profesi (Dengan Satuan:Orang)	0	30	101.890.001	30	96.490.000	30	90.800.000	30	91.990.000	30	80.230.000

010204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian mendapat Pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	100	158.140.002	100	151.080.002	100	149.390.000	100	151.380.002	100	141.520.002
010204201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				14.570.001		9.040.001		12.100.000		14.830.000		17.190.001
010204201001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah sarana yang Diperiksa (Dengan Satuan:Sarana)	8	9	14.570.001	9	9.040.001	9	12.100.000	9	14.830.000	9	17.190.001
010204203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				56.960.000		55.780.000		53.570.000		48.720.000		44.690.000
010204203001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pengawasan P-IRT yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0		56.960.000		55.780.000		53.570.000		48.720.000		44.690.000
010204204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restorandan Depot Air, Minum (DAM)				44.330.000		44.020.001		42.980.000		40.950.001		38.960.000
010204204001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah pengawasan TPM yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	2	44.330.000	2	44.020.001	2	42.980.000	2	40.950.001	2	38.960.000
010204206	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk				42.280.001		42.240.000		40.740.000		46.880.001		40.680.001

	Makanan Minuman Industri Rumah Tangga												
010204206001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah pemeriksaan post market Industri Rumah Tangga yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	2	42.280.001	2	42.240.000	2	40.740.000	2	46.880.001	2	40.680.001
010205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Pelaksanaan Kampanye Germas (Dengan Satuan:%)	0	20	131.693.643	40	156.224.672	60	143.512.079	80	137.260.619	100	116.098.106
		Persentase Posyandu Aktif (Dengan Satuan:%)	3	50		100		100		100		100	
010205201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				59.595.812		59.129.516		57.546.123		51.794.977		45.896.778
010205201001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	1	59.595.812	1	59.129.516	1	57.546.123	1	51.794.977	1	45.896.778
010205202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				42.097.831		66.940.000		61.750.000		55.790.001		47.270.000
010205202001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Kampanye GERMAS (dengan satuan: kegiatan)	0	2	42.097.831	2	66.940.000	2	61.750.000	2	55.790.001	1	47.270.000
010205203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000		30.155.156		24.215.956		29.675.641		22.931.328
010205203001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimtek dan supervisi yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	1	30.000.000	1	30.155.156	1	24.215.956	1	29.675.641	1	22.931.328
021402	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun (Dengan Satuan:Rata-rata anak per Wanita)	2,2	2,17	166.930.002	2,15	159.790.002	2,12	151.310.001	2,10	145.390.000	2,08	140.380.001

021402201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Data Keluarga yang tersedia (Dengan Satuan:Data)	0	2000	68.260.001	2000	58.390.001	2000	49.610.001	2000	45.280.000	2000	43.030.001
021402201002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan GDPK (Dengan Satuan:Kegiatan)	0	1	38.280.001	1	28.240.001	1	25.400.001	1	27.480.000	1	25.840.000
021402201003	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang akan dilakukan Pendataan Keluarga (Dengan Satuan:KK)	0	2000	29.980.000	2000	30.150.000	2000	24.210.000	2000	17.800.000	2000	17.190.001
021402202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengendalian Penduduk (Dengan Satuan:%)	0	0	98.670.001	0	101.400.001	0	101.700.000	0	100.110.000	0	97.350.000
		Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB (Dengan Satuan:%)	0	0		0		0		0		0	
		Jumlah Dokumen Hasil Dallap dan Pelkon KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2		2		2		2		2	
021402202002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Peserta Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan (Dengan Satuan:Jumlah)	0	0	29.140.000	0	30.150.000	0	30.260.000	0	29.670.000	0	28.650.000
021402202008	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang terbentuk (Dengan Satuan:Jumlah)	0	3	29.140.000	3	30.150.000	3	30.260.000	0	29.670.000	0	28.650.000
021402202011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	0	38	20.000.000	38	20.000.000	38	20.000.000	38	20.000.000	38	20.000.000
021402202013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta Pengolahan Data (Dengan Satuan:Jumlah Peserta)	0	216	20.390.001	216	21.100.001	216	21.180.000	216	20.770.000	216	20.050.000
021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	18,56	18	656.541.025	17,5	605.312.149	17	547.132.867	16,5	524.428.237	16	494.933.920
		Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) (Dengan Satuan:%)	0	70		70		70		70		70	

		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) (Dengan Satuan:per 1000 WUS 15-19 tahun)	27	25		23		21		19		17	
		Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/MCPR) (Dengan Satuan:%)		70		71		72		73		74	
021403201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Penyuluhan di Balai Penyuluhan KB (Dengan Satuan:%)	0	60	252.661.022	62	229.442.147	65	197.072.864	68	178.258.236	70	157.823.918
		Persentase Kampung KB yang melaksanakan program KKBPK (Dengan Satuan:%)	0	100		100		100		100		100	
021403201001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Advokasi yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	1	5.000.000	0	-	1	4.000.000	0	-	1	5.000.000
021403201002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah penyuluhan yang dilaksanakan (dengan satuan: kegiatan)	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000
021403201003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang mendapat distribusi KIE	0	10	83.000.000	10	38.000.000	10	34.000.000	10	20.000.000	10	10.000.000
021403201004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media KIE (dengan satuan: jenis)	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000
021403201005	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Jumlah Media KIE yang diadakan (Dengan Satuan:pcs)	0	50	17.801.022	50	18.372.147	50	15.462.863	50	15.048.235	50	14.563.918
021403201006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan (dengan satuan : kegiatan)	0	3	50.000.000	3	50.000.000	3	20.000.000	3	40.000.000	3	30.000.000
021403201007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Program KKBPK (Dengan Satuan:Kampung KB)	0	10	34.860.000	10	61.070.000	10	81.610.001	10	63.210.001	10	43.260.000
021403201008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Program KKBPK (Dengan Satuan:Kampung KB)	0	10	50.000.000	10	50.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	45.000.000

021403202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase kader KKBPK yang melaksanakan kegiatan (Dengan Satuan:%)	0	100	89.520.001	100	78.390.001	100	72.640.000	100	65.280.000	100	57.300.000
021403202004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader KKBPK yang melaksanakan kegiatan (Dengan Satuan:Orang)	0	62	89.520.001	62	78.390.001	62	72.640.000	62	65.280.000	62	57.300.000
021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat, dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan Alat dan Obat kontrasepsi di Faskes KB (Dengan Satuan:%)	0	0	314.360.002	0	255.270.001	0	232.020.002	0	233.410.001	0	231.100.001
021403203001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB, ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Kegiatan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) (Dengan Satuan:Kali)	0	4	6.280.000	4	12.060.000	4	18.160.001	4	23.740.000	4	28.650.000
021403203003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah kegiatan pelayanan MKJP (Dengan Satuan:Kali)	0	10	236.280.000	5	180.920.000	5	151.340.001	5	148.370.000	5	143.260.000
021403203006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dengan Satuan:Item)	0	15	69.880.001	15	60.300.001	15	60.530.000	15	59.350.000	15	57.300.000
021403203008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah kegiatan penyuluhan KB di Balai Penyuluhan (Dengan Satuan:Kali)	0	5	1.920.001	5	1.990.000	5	1.990.000	5	1.950.001	5	1.890.001
021403204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Cakupan Kampung KB di Kabupaten (Dengan Satuan:%)	0	0	-	0	42.210.000	0	45.400.001	0	47.480.000	0	48.710.001
021403204002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Pertemuan di Kampung KB (Dengan Satuan:Kali)	0	0	-	3	42.210.000	3	45.400.001	3	47.480.000	3	48.710.001
021403204003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan Program KKBPK	0	10	50.000.000	10	-	10	10.000.000	10	10.000.000	10	15.000.000
021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB (Dengan Satuan:%)	0	50	58.890.526	50,5	120.672.025	51	118.136.796	51,5	112.803.137	52	108.929.879

	KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (Dengan Satuan:%)	0	60		70		80		90		100	
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (Dengan Satuan:%)	0	32,46		34,46		36,46		38,46		40,46	
021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga yang aktif (Dengan Satuan:%)	0	40	58.890.526	45	120.672.025	50	118.136.796	55	112.803.137	60	108.929.879
021404201002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
021404201003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Orientasi (Dengan Satuan:Kali)	0	4	40.525	4	40.372.024	4	40.636.794	4	39.403.137	4	37.369.877
021404201004	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000		10.000.000
021404201006	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan yang mengikuti Kegiatan (Dengan Satuan:Kelompok)	0	15	26.620.000	15	45.230.000	15	42.370.000	15	38.570.000	15	37.240.000
021404201007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi (Dengan Satuan:kali)	0	0	-	10	9.040.001	10	9.080.001	10	8.900.000	10	8.590.001

			021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kegiatan Promosi dan Sosialisasi (Dengan Satuan:Kali)	0	5	12.230.001	5	6.030.000	5	6.050.001	5	5.930.000	5	5.730.001
TOTAL:								116.027.014.074		115.689.803.976		115.632.390.575		115.765.874.296		116.170.386.349

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan atau umumnya disebut dengan kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*). Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan Dinas Kesehatan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2021- 2026 yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama 5 tahun. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang kesehatan di Kabupaten Tana Tidung dapat dilihat pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Dinas Kesehatan yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tana Tidung

NO	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Indikator Kinerja Daerah							
1	Indeks Kesehatan	79,11	79,41	79,53	79,66	79,79	79,92	79,92
	Indikator Tujuan							
1	Usia Harapan Hidup	71,42	71,44	71,45	71,46	71,48	71,50	71,50
	Indikator Sasaran							
1	Angka Kematian Ibu (dengan satuan per 100.000 kelahiran hidup)	195	295	257	227	195	185	185
2	Angka Kematian Bayi (dengan satuan per 1.000 kelahiran hidup)	8	14	13	11	10	9	9
3	Angka Kesakitan (dengan satuan %)	19,37	19,50	19,40	19,30	19,20	19,10	19,10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (dengan satuan %)	79,96	80,25	80,75	81,25	81,75	82,25	82,25
	Indikator Kinerja Program							
1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	7,8	7	6,5	6	5,5	5	5
2	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (dengan satuan per 1.000 kelahiran hidup)	5,8	5,5	5	4,5	4	4	4

3	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (dengan satuan %)	94	95	95,5	96	96,5	96,8	96,8
4	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (Dengan Satuan:%)	92,1	95	95	95	95	95	95
5	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (dengan Satuan: %)	56	70	75	80	82	85	85
6	Persentase pelayanan Kesehatan Usia Produktif (dengan Satuan: %)	6,8	100	100	100	100	100	100
7	Persentase pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (dengan Satuan:%)	5,3	100	100	100	100	100	100
8	Persentase pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus (dengan Satuan:%)	20,7	100	100	100	100	100	100
9	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (Dengan Satuan:%)	17,3	100	100	100	100	100	100
10	Persentase Kasus KLB/Berpotensi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Dengan Satuan:%)	21,6	100	100	100	100	100	100
12	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi (Dengan Satuan:%)	66,67	71,43	85,71	85,71	85,71	100	100
13	Cakupan masyarakat memiliki jaminan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial >85% (Dengan Satuan:%)	80	100	100	100	100	100	100
15	Persentase sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	60	70	75	80	85	90	90
16	Persentase ketersediaan SDM kesehatan sesuai standar (Dengan Satuan:%)	75	100	100	100	100	100	100

17	Persentase SDMK mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi (Dengan Satuan:%)	0	100	100	100	100	100	100
18	Persentase Sarana Pelayanan Kefarmasian mendapat Pengawasan (Dengan Satuan:%)	100	100	100	100	100	100	100
19	Persentase Pelaksanaan Kampanye Germas (Dengan Satuan:%)	0	20	40	60	80	100	100
20	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR per WUS usia 15-49 Tahun (Dengan Satuan: Rata-rata anak per Wanita)	2,2	2,17	2,15	2,12	2,10	2,08	2,08
21	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (Dengan Satuan:%)	18,56	18	17,5	17	16,5	16	16
22	Persentase pemakaian kontrasepsi (CPR) (Dengan Satuan:%)	NA	70	70	70	70	70	70
	Indikator Kinerja Kegiatan							
1	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia (Dengan Satuan: Paket)	1	3	2	2	2	2	11
2	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang terbangun (dengan satuan : unit)	0	1	1	1	1	1	5
3	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang terbangun (Dengan Satuan: Unit)	0	2	2	2	2	2	10
4	Jumlah Rumah Sakit yang dikembangkan (Dengan Satuan: Unit)	0	0	0	1	0	0	1
5	Jumlah Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan gedung (Dengan Satuan:Unit)	1	1	1	1	1	2	2
6	Jumlah Puskesmas yang dilakukan pemeliharaan gedung (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1	1	1	1	5
7	Jumlah Puskesmas Pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya yang dilakukan pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)	0	2	2	2	2	2	10

8	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dilakukan pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	1	1	1	1	4
9	Jumlah Ambulance dan Kendaraan Puskesmas Keliling yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1	1	1	1	5
10	Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tersedia (Dengan Satuan:Unit)	3	1	1	1	1	0	4
11	Persentase ketersediaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:%)	60	70	75	80	85	90	90
12	Jumlah Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial >85% (Dengan Satuan:Puskesmas)	4	5	5	5	5	5	5
13	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi kebutuhan dan ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (Dengan Satuan:Puskesmas)	5	5	5	5	5	5	5
14	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1	1	1	1	5
15	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1	1	1	1	1	5
16	Persentase Alat Kesehatan yang terpelihara (Dengan Satuan:%)	5	10	15	20	25	30	30
17	Jumlah Fasyankes yang terakreditasi (Dengan Satuan:Fasyankes)	4	4	5	6	6	6	6
18	Jumlah puskesmas yang melaksanakan layanan kesehatan UKM dan UKP (Dengan Satuan:puskesmas)	5	5	5	5	5	5	5
19	Jumlah Fasyankes yang mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Dengan Satuan:Fasyankes)	0	6	6	6	6	6	6
20	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang mendapatkan izin operasional (Dengan Satuan: Unit)	6	7	7	7	7	7	7
21	Jumlah Fasyankes yang memiliki ketersediaan SDMK sesuai standar	0	1	2	3	4	5	5

	(dengan satuan fasyankes)							
22	Jumlah SDMK bersertifikat profesi (dengan satuan: orang)	NA	300	310	320	330	350	350
23	Jumlah Data Keluarga yang tersedia (Dengan Satuan:Data)	0	2000	2000	2000	2000	2000	10.000
24	Jumlah Dokumen Hasil Dallap dan Pelkon KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2	2	2	2	2	10

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Tana Tidung untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Tidung 2021-2026. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

Permasalahan pembangunan kesehatan di masyarakat sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kesehatan. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas kesehatan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota. Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kesehatan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan bidang kesehatan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.